



SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 127 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN CILENGKRANG
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cilengkrang Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Penganggaran Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9)
17. Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Nomor 67 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 149 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 (Berita daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 67);
18. Peraturan Bupati Bandung Nomor 93 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 93);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN CILENGKRANG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran PD.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahunan.

12. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan suatu PD, serta pagu anggaran sementara yang didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS APBD.
13. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahunan.
14. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah atau Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program PD.
15. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil terukur sesuai dengan tugas dan fungsi PD.
16. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
17. Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas dan layanan dari kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB II PERUBAHAN RENJA PD

Pasal 2

Perubahan Renja PD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah yang memuat penjabaran dari Perubahan RKPD Tahun 2025 dan berpedoman pada Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Pasal 3

Dokumen Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sekurang-kurangnya memuat :

- a. Latar belakang dan Dasar Hukum;
- b. Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu;
- c. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
- d. Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah;
- e. Penutup; dan

- f. Lampiran program/ kegiatan/ sub kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Pasal 4

- (1) Perubahan Renja PD dilaksanakan untuk melakukan penyesuaian berdasarkan Perubahan RKPD Tahun 2025.
- (2) Perubahan Renja PD Tahun 2025 dilaksanakan untuk :
 - a. Penyesuaian target kinerja, pagu indikatif, lokasi dan kelompok sasaran program/kegiatan/sub kegiatan;
 - b. Laporan pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra PD tahun berkenaan; dan
 - c. Menjaga konsistensi target capaian indikator kinerja Perangkat Daerah, dengan melakukan penyesuaian nomenklatur sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025.

Pasal 5

- (1) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dijadikan salah satu dasar penyusunan perubahan rencana kerja dan anggaran (RKA) PD.
- (2) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menjadi dasar penyusunan laporan evaluasi hasil Renstra PD.

BAB III

KAIDAH PELAKSANAAN DAN PELAPORAN RENJA PD

Pasal 6

Kaidah Perubahan Renja PD meliputi;

- (1) Semua ketetapan perubahan indikator kinerja dan pagu indikatif pendanaan menjadi tanggungjawab PD sesuai dengan tugas dan fungsi PD.
- (2) Target kinerja dan pagu indikatif dapat berubah menyesuaikan dengan perubahan KUA-PPAS yang telah disepakati bersama DPRD.
- (3) Perubahan target kinerja dan pagu indikatif sebagaimana ayat (2), dilengkapi dengan berita acara atau risalah rapat antara PD dengan DPRD.
- (4) Perubahan-perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dilaporkan pada saat penyampaian laporan evaluasi hasil Renja PD triwulan IV tahun berkenaan.

BAB IV PENETAPAN PERUBAHAN RENJA PD

Pasal 7

Penetapan Perubahan Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengacu pada :

- a. Surat Edaran Bupati Bandung tentang Penyusunan Perubahan Renja PD.
- b. penetapan Perubahan RKPD Tahun 2025; dan
- c. hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD Triwulan I tahun berjalan.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen Perubahan Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 7 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Kepala PD yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja PD sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Kepala PD melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja PD yang meliputi pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan dan capaian kinerja yang menjadi target PD dan kebijakan perubahan Renja PD.
- (3) Kepala PD melaporkan hasil evaluasi terhadap Perubahan Renja PD periode pelaporan triwulan IV yang disampaikan kepada Bupati melalui Kepala PD yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah untuk diverifikasi paling lambat minggu pertama bulan Januari tahun berikutnya.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pelaporan hasil evaluasi terhadap Perubahan Renja PD mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 26 Juni 2025

BUPATI BANDUNG,

ttd

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 26 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 127

salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



YANA ROSMIANA, S.H.M.H

Pembina Tk.I

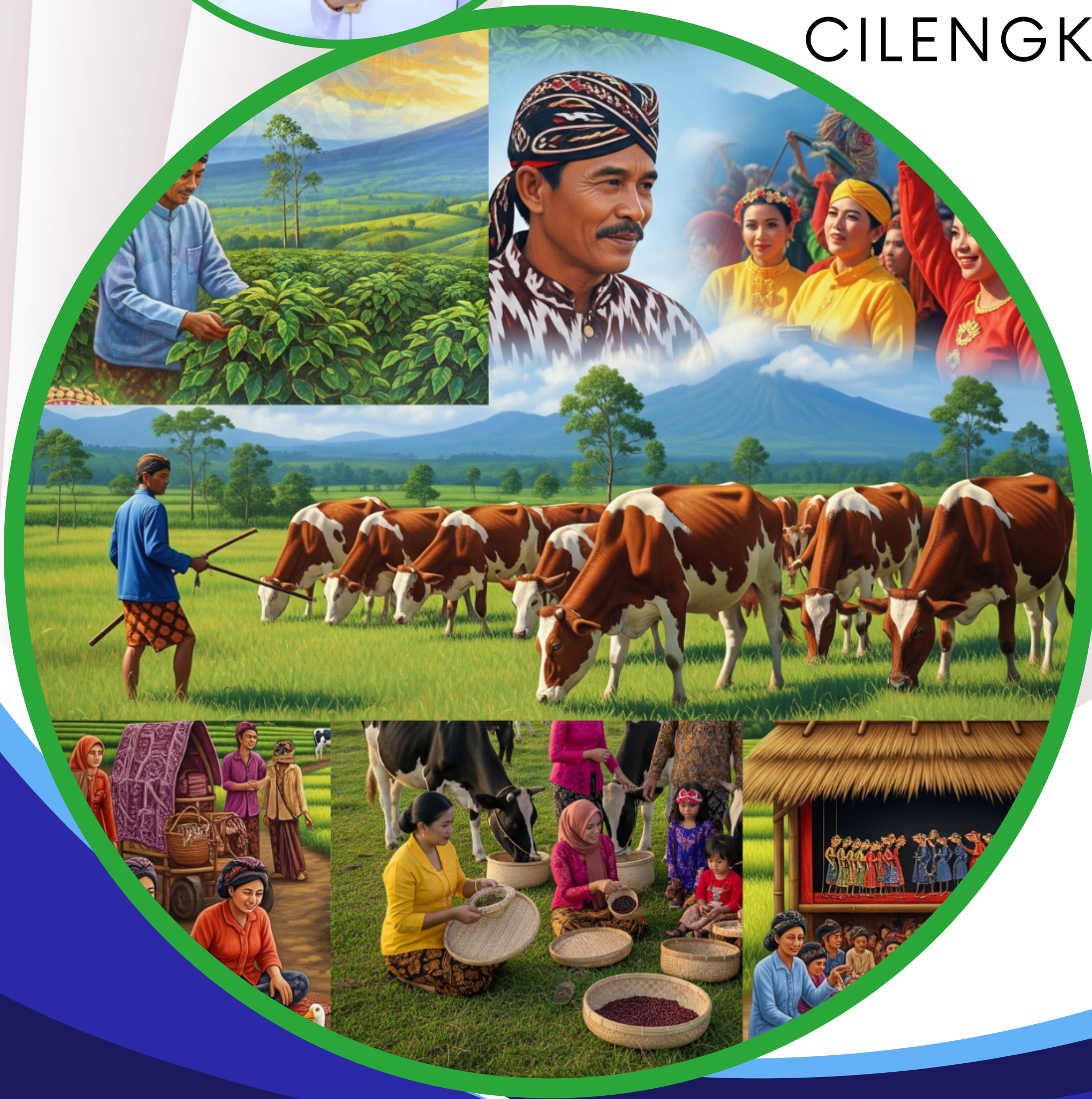
NIP. 196901011999012001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
BANDUNG
NOMOR 127 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA
KECAMATAN CILENGKRANG
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN CILENGKRANG
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025

BUPATI BANDUNG PERATURAN

PERUBAHAN
RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025
KECAMATAN
CILENGKRANG



KATA PENGANTAR

Perubahan Rencana Kerja SKPD adalah dokumen rancangan perencanaan SKPD untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung Tahun 2025 mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Tahun 2025. Oleh karena itu penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cilengkrang Tahun 2025 dapat dikerjakan dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Kecamatan Cilengkrang, evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Cilengkrang tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Kecamatan Cilengkrang Tahun 2024 dan 2025.

Tersusunnya Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cilengkrang Tahun 2025 ini, disamping sebagai dokumen rencana kerja, juga diharapkan dapat dijadikan bahan acuan dalam penyusunan rencana kegiatan tahunan sehingga terdapat arah yang jelas dari program/ kegiatan Kecamatan Cilengkrang sebagai perangkat daerah yang bertanggungjawab dalam bidang perencanaan pembangunan daerah.

Cilengkrang, Juni 2025

KAMAT CILENGKRANG



Drs AGUS RIZAL, M.Si

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 19680812 199010 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
 BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistimatika Penyusunan	8
 BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	10
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	10
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	24
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	37
2.4. Review terhadap Rancangan Akhir RKPD	41
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	52
 BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	53
3.1. Telaahaan Terhadap Kebijakan Nasional	53
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	55
3.3. Program dan Kegiatan	57
 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	65
 BAB V PENUTUP	73
5.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja	73
5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan	73
5.3. Rencana Tindak Lanjut.....	75

Lampiran-lampiran

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung telah menetapkan rencana jangka pendek untuk periode satu tahun yang dituangkan ke dalam Rencana Kerja Kecamatan Cilengkrang untuk tahun 2024 melalui Peraturan Bupati Bandung Nomor 171 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung Tahun 2024. Berpedoman pada peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014, Perubahan Rencana Kerja dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian.

Dalam keberjalanan implementasi perencanaan, terdapat dinamika perkembangan pembangunan daerah baik pada level internal Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung maupun di level provinsi dan nasional, maka dari itu diperlukan upaya penyesuaian substansi pada dokumen Rencana kerja Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung Tahun 2025. Perubahan Renja Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung Tahun 2025 secara umum dilatarbelakangi oleh adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah yang menyebabkan dinamika pembangunan di tahun 2024 sampai dengan tahun 2025, adanya perubahan RPKD Kabupaten Bandung Tahun 2025, keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih dari tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, dan adanya kebijakan yang menyebabkan *refocusing* anggaran.

Hasil evaluasi pembangunan tahun 2024 dan evaluasi renja triwulan I tahun 2025 menunjukan adanya dinamika pembangunan di Kecamatan Cilengkrang secara Khusus dan Kabupaten Bandung secara umum yang mendorong perlunya sinkronisasi perencanaan dengan kondisi pembangunan yang sedang berjalan, dimana terdapat syarat untuk dilakukan perubahan diantaranya, ditemukan beberapa substansi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perlu penyesuaian pada beberapa target indikator pembangunan, dan perubahan kebijakan daerah yang perlu diakomodir dalam dokumen.

Renja Perubahan Tahun 2025 memuat hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I, perubahan-perubahan sasaran dan prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan daerah, berikut dengan asumsi dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan tersebut. Penyusunan Rancangan awal Renja Perubahan Tahun 2025 selain untuk mewujudkan sinergitas dan menjamin konsistensi pelaksanaan dan pengawasan penganggaran serta mewujudkan efisiensi berbagai sumber daya pada pembangunan daerah, berpedoman kepada Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP), serta Perubahan RKPD Tahun 2025 menjadi penting peranannya dalam rangka menjaga efisiensi perencanaan pembangunan di Kabupaten Bandung

Sehubungan dengan hal tersebut, Kecamatan Cilengkrang menyusun Renja Perubahan Tahun 2025 yang memuat program, kegiatan, Subkegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Cilengkrang. Renja Perubahan Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten Bandung Tahun 2025, hasil evaluasi renja tahun 2024, prognosis pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran tahun 2025 dan Hasil Review dari Rancangan Akhir Perubahan RKPD yang disesuaikan dengan kebutuhan Perangkat Daerah.

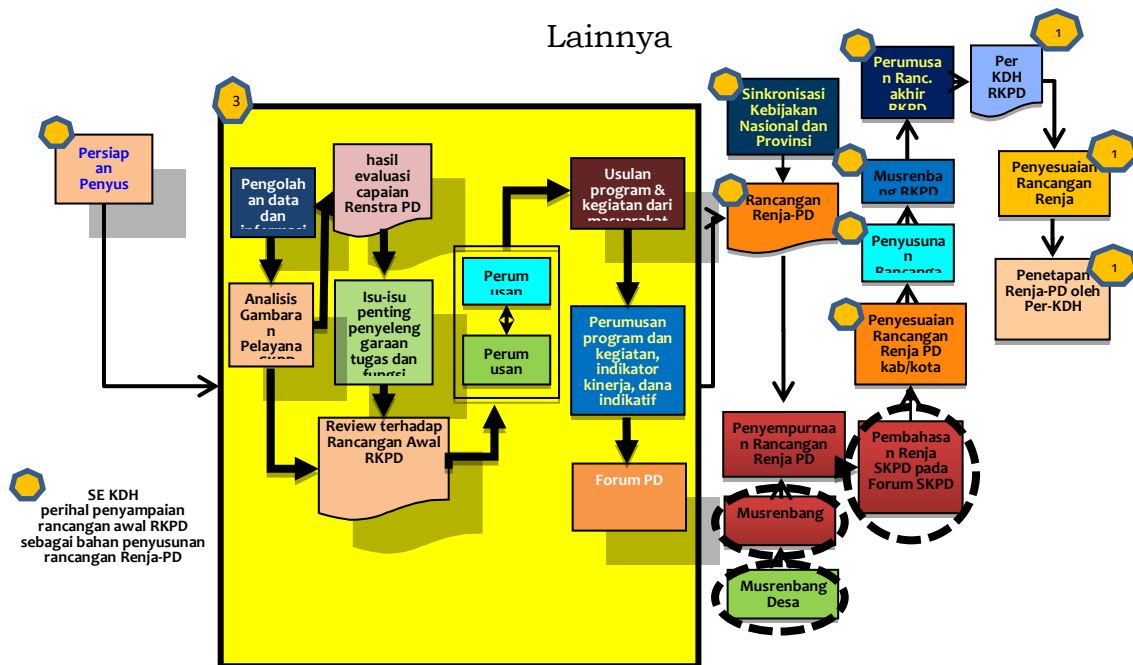
Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Perubahan Kecamatan Cilengkrang Tahun 2025 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Persiapan penyusunan,
- b. Penyusunan rancangan awal
- c. Penyusunan Rancangan
- d. Penyusunan Rancangan Akhir,

Perubahan Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah. Proses penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Secara lebih rinci, hubungan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Ranwal Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung Tahun 2025 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat

- Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 4);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung nomor 9 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung tahun 2025-2045;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 100);
 19. Peraturan Bupati Bandung No.1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;
 20. Peraturan Bupati No. 120 tahun 2023 tentang Pedoman Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Kecamatan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;
 21. Peraturan Bupati Bandung No.1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;
 22. Peraturan Bupati Bandung Nomor 159 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung Tahun 2025;
 23. Peraturan Bupati Bandung Nomor 93 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Tahun 2025;
 24. Keputusan Bupati Bandung Nomor: 137.1/Kep.580-Adpem/2018 Tentang Perlimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati Kepada Camat;

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam Perangkat Daerah, serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

2. Tujuan :

- a. Menyediakan dokumen perencanaan tahunan Kecamatan Cilengkrang Tahun 2025;
- b. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan Tahun 2024 dan 2025;
- c. Sebagai pedoman perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penyusunan

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung Tahun 2025 disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Akhir RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahaan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

5.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja

5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

5.3. Rencana Tindak Lanjut

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 merupakan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan perkiraan capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA Perangkat Daerah yang mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi serta dana indikatif.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Cilengkrang Tahun 2024 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Cilengkrang Tahun 2025 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Kecamatan Cilengkrang Tahun 2025 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Kecamatan Cilengkrang Tahun 2021-2026 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bandung Tahun 2025.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Cilengkrang tahun 2024 dan pelaksanaan renja triwulan 1 tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

T-C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah
Sampai Dengan Tahun 2021-2026 Kabupaten Bandung

Nama PD : Kecamatan Cilengkrang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Maret Tahun 2025		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi s/d Triwulan I Tahun 2025	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7/6)	(9)	(10)	(11)=(5+7+10)	(12)=(11/4)
7	UNSUR KEWILAYAHAN										
7.01	KECAMATAN										
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	80 poin	76.08 point	77 point	79.80 Point	102.60%	80.00 Point	-	79.80 Point	99.75%
		Persentase BMD Dalam Keadaan Baik	88 %	85.00	86.00	84.89	96.71%	87.00 %	-	84.89	96.47%
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun Sesuai Ketertuan dan Tepat Waktu	100%	40%	100%	100%	100.00%	100.00 %	-	45.00%	45.00%
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 dokumen	4 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100.00%	2.00 Dokumen	-	6 dokumen	54.55%
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	2 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00%	1.00 Dokumen	-	3 dokumen	60.00%
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 Dokumen	2 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00%	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	4 dokumen	80.00%
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 Dokumen	2 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00%	1.00 Dokumen	-	3 dokumen	60.00%
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 Dokumen	2 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00%	1.00 Dokumen	-	3 dokumen	60.00%
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Dokumen	2 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00%	1.00 Laporan	-	3 dokumen	60.00%
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	2 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00%	1.00 Laporan	1.00 Laporan	3 dokumen	60.00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Maret Tahun 2025		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi s/d Triwulan I Tahun 2025	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7/6)	(9)	(10)	(11)=(5+7+10)	(12)=(11/4)
7.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	2 Dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0.00%	1.00 Dokumen	-	0 dokumen	0.00%
7.01.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	2 Dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0.00%	1.00 Data	1.00 Data	0 dokumen	0.00%
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan yang Tepat Waktu	100 %	40%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00 %	-	45%	45.00%
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1440 orang/bulan	576 orang / bulan	288 orang/ bulan	279 orang/ bulan	100.00%	288.00 Orang/bulan	66 orang/bulan	921 orang / bulan	63.96%
7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 dokumen	0 dokumen	dokumen	dokumen	0.00%	4.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1 dokumen	8.33%
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100.00%	1.00 Laporan	1.00 Laporan	4 dokumen	80.00%
7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	20 dokumen	8 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100.00%	4.00 Dokumen	1.00 Dokumen	13 dokumen	65.00%
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD Sesuai Kebutuhan	100 %	40.00 %	100.00%	100.00%	100.00%	100.00 %	-	45.00%	45.00%
7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	20 Laporan	8 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100.00%	4.00 Laporan	1.00 Laporan	13 dokumen	65.00%
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Tepat Waktu	100 %	40.00 %	100.00%	80.00%	80.00%	100.00 %	-	40.00%	45.00%
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 paket	1 paket	Paket	Paket	0.00%	1.00 Paket	-	1 paket	50.00%
7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	120 Dokumen	48 dokumen	8 Dokumen	6 Dokumen	80.00%	24.00 Dokumen	6.00 Dokumen	60 Dokumen	50.00%
7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	48 orang	20 orang	orang	orang	0.00%	-	-	20 orang	41.67%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Maret Tahun 2025		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realiasi s/d Triwulan I Tahun 2025	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7/6)	(9)	(10)	(11)=(5+7+10)	(12)=(11/4)
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor		40.00 %	100.00%	75.00%	75.00%	100.00 %	-	45.00%	45.00%
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	60 Paket	24 paket	12 Paket	8 Paket	67.00%	12.00 Paket	3.00 Paket	35 paket	58.33%
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60 Paket	24 paket	12 Paket	10 Paket	83.00%	12.00 Paket	3.00 Paket	37 paket	61.67%
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	60 Paket	24 paket	12 Paket	6 Paket	50.00%	12.00 Paket	3.00 Paket	33 paket	55.00%
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	48 paket	24 Paket	12 Paket	9 Paket	75.00%	12.00 Paket	3.00 Paket	36 paket	0.60%
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	60 Paket	24 paket	12 Paket	10 Paket	83.00%	12.00 Paket	3.00 Paket	37 paket	0.62%
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	20 laporan	0 laporan	12 Laporan	0 Laporan	0.00%	4.00 Laporan	-	0 laporan	0.00%
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	132 laporan	24 laporan	24 Laporan	21 Laporan	87.00%	24.00 Laporan	-	45 laporan	34.09%
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0.00%	0 unit	-	0 unit	0.00%
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 paket	0 unit	0 unit	0 unit	0.00%	0 unit	-	0 unit	0.00%
7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0.00%	0 unit	-	0 unit	0.00%
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0.00%	0 unit	-	0 unit	0.00%

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Maret Tahun 2025		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi s/d Triwulan I Tahun 2025	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7/6)	(9)	(10)	(11)=(5+7+10)	(12)=(11/4)
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Persentase Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	100 %	40.00 %	100.00%	100.00%	100.00%	100.00 %	-	45.00%	45.00%
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 laporan	24 laporan	12 Laporan	12 Laporan	100.00%	12.00 Laporan	3.00 Laporan	39 laporan	65.00%
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 laporan	24 laporan	12 Laporan	12 Laporan	100.00%	12.00 Laporan	3.00 Laporan	39 laporan	65.00%
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam Kondisi Baik	100 %	40.00%	100.00%	85.00%	85.00%	86.00 %	-	45.00%	45.00%
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya	9 unit mobil 20 motor	4 unit mobil 8 motor	2 unit mobil 4 motor 1 torca	2 unit mobil 4 motor 1 torca	100.00%	6.00 Unit	2 Unit	8 unit mobil 12 motor	68.97%
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 unit/tahun	8 unit / tahun	10 unit/tahun	4 unit/tahun	50.00%	10.00 Unit	-	12 unit / tahun	24.00%
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 unit	1 unit	unit	unit	0.00%	1.00 Unit	-	1 unit	25.00%
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	0 unit	unit	unit	0.00%	unit	-	0 unit	0.00%
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	86 poin	80 poin	82 poin	82 poin	100.00%	86.00 Point	-	80 poin	93.02%
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Usuran Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase pelaksanaan urusan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja lain	100.00%	40.00 %	100.00%	100.00%	100.00%	100.00 %	-	45.00%	45.00%
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8 laporan	2 laporan	1 laporan	1 laporan	100.00%	2.00 Laporan	-	3 laporan	37.50%
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	100%	40.00 %	100.00%	75.00%	75.00%	100.00 %	-	45.00%	45.00%

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Maret Tahun 2025		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realiasi s/d Triwulan I Tahun 2025	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7/6)	(9)	(10)	(11)=(5+7+10)	(12)=(11/4)
7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	16 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	2 dokumen	50.00%	2.00 Dokumen	-	6 dokumen	37.50%
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan	100%	40.00%	100.00%	100.00%	0.00%	100.00 %	-	45.00%	45.00%
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	45 laporan	15 laporan	3 laporan	3 laporan	100.00%	4.00 Laporan	1.00 Laporan	19 laporan	42.22%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	86 poin	80 poin	82 poin	82 poin	100.00%	86.00 Point	-	80 poin	93.02%
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100.00%	40.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00 %	-	45.00%	45.00%
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10 Laporan	4 kegiatan	2 Laporan	2 Laporan	100.00%	2.00 Laporan	-	6 kegiatan	60.00%
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Terfasilitasi	100%	40.00%	100.00%	80.00%	80.00%	100.00 %	-	45.00%	45.00%
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	9 lembaga	4 lembaga	2 lembaga	2 lembaga	100.00%	2 lembaga	-	6 lembaga	66.67%
7.01.03.2.03.0004	Facilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	15 laporan (Bumdes DanaBergulir,Ka rtu Tani)	4 laporan	3 Laporan	0 Laporan	0.00%	1.00 Laporan	-	4 laporan	26.67%
7.01.03.2.03.0005	Facilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitas Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	4 laporan	0 laporan	laporan	laporan	0.00%	1.00 Laporan	-	0 laporan	0.00%
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00 %	-	0.00%	0.00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Maret Tahun 2025		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi s/d Triwulan I Tahun 2025	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7/6)	(9)	(10)	(11)=(5+7+10)	(12)=(11/4)
7.01.03.2.06.0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	60 Keluarga	0 keluarga	0 keluarga	0 keluarga	0.00%	30.00 Keluarga	-	0 keluarga	0.00%
7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	60 Keluarga	0 keluarga	0 keluarga	0 keluarga	0.00%	30.00 Keluarga	-	0 keluarga	0.00%
7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	60 Keluarga	0 keluarga	0 keluarga	0 keluarga	0.00%	30.00 Keluarga	-	0 keluarga	0.00%
7.01.03.2.06.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	60 Keluarga	0 keluarga	0 keluarga	0 keluarga	0.00%	30.00 Keluarga	-	0 keluarga	0.00%
7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	60 Keluarga	0 keluarga	0 keluarga	0 keluarga	0.00%	30.00 Keluarga	-	0 keluarga	0.00%
7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	60 Keluarga	0 keluarga	0 keluarga	0 keluarga	0.00%	30.00 Keluarga	15.00 Keluarga	0 keluarga	0.00%
7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	60 Keluarga	0 keluarga	0 keluarga	0 keluarga	0.00%	30.00 Keluarga	-	0 keluarga	0.00%
7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	60 Keluarga	0 keluarga	0 keluarga	0 keluarga	0.00%	30.00 Keluarga	-	0 keluarga	0.00%
7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	60 Keluarga	0 keluarga	0 keluarga	0 keluarga	0.00%	30.00 Keluarga	-	0 keluarga	0.00%
7.01.03.2.06.0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	60 Keluarga	0 keluarga	0 keluarga	0 keluarga	0.00%	30.00 Keluarga	-	0 keluarga	0.00%

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Maret Tahun 2025		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realiasi s/d Triwulan I Tahun 2025	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7/6)	(9)	(10)	(11)=(5+7+10)	(12)=(11/4)
7.01.03.2.06.0011	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga Yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	60 Keluarga	0 keluarga	0 keluarga	0 keluarga	0.00%	30.00 keluarga	-	0 keluarga	0.00%
7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	60 Keluarga	0 keluarga	0 keluarga	0 keluarga	0.00%	30.00 keluarga	-	0 keluarga	0.00%
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	86 poin	80 poin	82 poin	82 poin	100.00%	86.00 Point	-	80 poin	93.02%
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koodinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	20.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00 %	-	20.00%	20.00%
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	30 laporan	2 laporan	6 Laporan	0 Laporan	0.00%	1.00 Laporan	-	2 laporan	20.00%
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100%	40.00%	100.00%	70.00%	70.00%	100.00 %	-	45.00%	45.00%
7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	60 laporan	24 laporan	12 Laporan	9 Laporan	70.00%	12.00 Laporan	-	31 laporan	51.67%
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	86 poin	80 poin	82 poin	82 poin	100.00%	86.00 Point	-	80 poin	93.02%
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	40.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00 %	-	45.00%	45.00%
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	1500 Orang	600 orang	300 orang	300 orang	100.00%	300.00 Orang	-	900 orang	60.00%
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	1500 Orang	600 orang	300 orang	300 orang	100.00%	300.00 Orang	90 orang	990 orang	66.00%
7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	8 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100.00%	1.00 Dokumen	-	4 dokumen	50.00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Maret Tahun 2025		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi s/d Triwulan I Tahun 2025	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7/6)	(9)	(10)	(11)=(5+7+10)	(12)=(11/4)
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	48 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100.00%	12.00 Dokumen	3.00 Dokumen	27 laporan	56.25%
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Desa Mandiri	6 Desa	2 desa	1 Desa	1 Desa	100.00%	1.00 Desa	-	3 desa	50.00%
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang dbina dan diawasi	100%	40.00 %	100.00%	100.00%	100.00%	100.00 %	-	40.00%	45.00%
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	30 dokumen	12 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100.00%	6.00 Dokumen	1.00 Dokumen	19 Dokumen	63.33%
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	30 dokumen	12 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100.00%	6.00 Dokumen	1.00 Dokumen	19 Dokumen	63.33%
7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	4 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0.00%	0 Dokumen	-	0 Dokumen	0.00%
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00%	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	4 Dokumen	80.00%
7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	2 dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0.00%	0 Dokumen	-	0 Dokumen	0.00%
7.01.06.2.01.0014	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	4 laporan	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0.00%	0 Dokumen	-	0 Dokumen	0.00%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis Kinerja Pelayanan pada Kantor Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung merupakan kajian terhadap capaian Kinerja berdasarkan Indikator Kinerja yang sudah ditentukan Renstra 2021-2026, Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dari mulai proses sampaikan dengan tataran pelaksanaan/implementasi di lapangan, sehingga akan terwujud sinergi antara perencanaan pembangunan.

Pencapaian Kinerja Kecamatan Cilengkrang selama tahun 2024 dalam berbagai bidang baik bidang pemerintahan, pembangunan, sosial budaya, ketentraman dan ketertiban, Pendapatan Asli Daerah, maupun pembangunan infrastruktur hasil Musrenbang tahun 2023 yang terealisasi pada tahun 2024, dan hasil musrenbang tahun 2024 yang akan terrealisasi pada tahun 2025.

Pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Cilengkrang dapat terealisasi dengan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh kecamatan diantaranya

1. Pada bidang Pemerintahan, telah dilaksanakan beberapa kegiatan:
 - dilaksanakan pembinaan tiga bulan sekali, kepada aparat Pemerintahan Desa, Lembaga Desa, Lembaga Kemasyarakatan desa dengan materi masalah pemerintahan dan sosial dari semua Seksi di lingkungan Kecamatan Cilengkrang serta pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintah desa
 - Kegiatan rutin yang selalu dilaksanakan setiap tahunnya dan berkala adalah sosialisasi Peraturan Perundang-undangan, sosialisasi DD, ADPD dan Bantuan Gubernur, evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, serta monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa
 - Dalam bidang Kependudukan, sebagai tindak lanjut pelaksanaan pembuatan KTP Elektronik (KTP el), serta untuk tertibnya administrasi kependudukan dilaksanakan kegiatan peningkatan pelayanan publik alam bidang kependudukan dengan dilaksanakannya pelayanan kependudukan secara mobile di desa desa dan telah hadirnya Anjungan Dukcapil Mandiri di Desa Jatiendah dan Desa Girimekar
 - Mengenai pelayanan di bidang pembuatan KTP, KK, surat keterangan pindah, dan surat-surat kependudukan lainnya, telah terlayani dengan baik, dan seluruh permohonan telah diproses

sesuai SOP yang berlaku.

- Pengecekan dalam pengetikan Susunan Akhli Waris
2. Pada bidang Sosial dan Budaya, telah dilaksanakan kegiatan berupa:
- Pembinaan puskesmas di 6 desa
 - Berkoordinasi dengan TKSK, PSM dan Fasilitator PKH
 - Berkoordinasi dengan para kasi kesra selaku ketua puskesmas, karang taruna, SLRT sebagai pilar-pilar sosial di tiap desa yang menangani permasalahan sosial di tiap desa
 - Berkoordinasi dengan elemen-elemen kepemudaan yang berada di bawah KNPI
 - Berkoordinasi dengan Korwil TK/SD kaitan dengan pelaksanaan UAN dan kebijakan Bupati Bandung tentang pemberian insentif bagi para guru ngaji
 - Monitoring pelaksanaan pendistribusian Bansos Sembako/BPNT di tiap desa
 - Membentuk tim koordinasi Bansos Sembako Tingkat Kecamatan
 - Mendorong terbentuknya Timlak Bansos Sembako tingkat desa
 - Memasyarakatkan kegiatan keolahragaan bersama Kormi Tingkat Kecamatan
 - Membentuk UPZ (Unit Pengumpul Zakat) Kecamatan
 - Mendorong terbentuknya Gerai UPZ tiap desa
 - Mendorong kreatifitas pemuda dalam giat seni dan budaya
 - Membina dan mengkoordinasikan kegiatan seni benjang di wilayah kecamatan cilengkrang dalam kegiatan Festival Benjang yang diselenggarakan oleh Disparbud Kab Bandung dan Paguyuban Seni Benjang (Paseban) wilayah Kecamatan Cilengkrang
 - Memfasilitasi kegiatan olahraga Bupati Cup dalam cabang olahraga Pencaksilat, Tennis Meja dan sepakbola U 16.
 - Memfasilitasi pendistribusian bansos Sembako dari pusat, provinsi dan kabupaten
 - Berkoordinasi dengan Korwil pendidikan tingkat kecamatan, Ormas dan OKP
 - Berkoordinasi dengan unsur-unsur penggerak kegiatan keagamaan tingkat kecamatan, yaitu DKM, MUI, KUA dan Ormas Islam
 - Melaksanakan monev Dana Desa, ADPD, dan Bantuan Gubernur
 - Mendorong LLI eksis di Kecamatan

- Berkoordinasi dengan PT POS berkenaan dengan bansos Covid-19
 - Mendistribusikan BNBA penerimaan Bansos
 - Menginventarisir data olahraga tiap desa
 - Memberikan rekomendasi proposal kegiatan social dan keagamaan
 - Pembinaan karang taruna ke desa-desa
 - Berkoordinasi dengan LLI dan KORMI Kecamatan Cilengkrang
 - Pembinaan dengan PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat)
3. Pada Bidang Pembangunan, telah dilaksanakan beberapa kegiatan:
- Melaksanakan pembinaan dan monitoring serta evaluasi terhadap bantuan-bantuan seperti ADPD, raksa desa, bantuan gubernur dan Dana Desa ke desa-desa, terutama kegiatan fisik dan laporan pertanggung jawaban (SPJ),
 - Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur hasil Musrenbang yang telah dilaksanakan oleh pihak ketiga; pembangunan jaringan irigasi, pembangunan rutilahu, rehab jalan beton dan hotmix, Penerangan Jalan Umum.
 - Fasilitasi pemberian rekomendasi di bidang lingkungan hidup dan pengkoordinasian bahan pengawasan dan pengendalian fungsi daerah aliran sungai (DAS) serta fungsi prasarana dan sarana pengairan baik teknis/non teknis serta pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air dan pertambangan.
 - Sosialisasi edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan, dan sosialisasi penyelenggaraan prasarana pelayanan umum
 - Monitoring evaluasi kegiatan operasi bersih yang dilaksanakan oleh kader lingkungan Bandung Bedas Bersih Sampah (B3S)
 - Fasilitasi pelaksanaan sosialisasi pelayanan Perijinan Menggunakan Bangunan (PBG) dan perizinan OSS RBA bekerjasama dengan Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
 - Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Program Rutilahu dari Dinas Perkintan dan Monev Fasos dan Fasum
4. Pada Bidang Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan Cilengkrang kondisi ketentraman dan ketertiban selama ini berjalan cukup aman, lancar dan tertib berkat adanya koordinasi yang baik dan terpadu antar Pemerintahan Kecamatan, Polsek dan Koramil setempat serta Kasi terkait. Beberapa langkah yang telah diambil dalam usaha

memelihara ketentraman dan ketertiban, antara lain :

- Memelihara, memupuk serta mengawasi keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat melalui penyuluhan ke tiap desa secara periodik bersama unsur terkait, kaitan dengan pendataan bangunan liar, tower, mini market dan warnet, penertiban perijinan perusahaan, penertiban kontrakan, penertiban banner dan reklame.
- Meningkatkan pengawasan, dan kesiapsiagaan di setiap Kantor Pemerintahan dan Desa-desa dengan patrol wilayah, mengintensifkan pelaksanaan Piket anggota dan karyawan kantor, pemberdayaan Siskamling, pembinaan linmas dan pengefektifan Pos Kamling yang telah ada.
- Bekerjasama dengan Kapolsek dan Koramil memberi pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan surat-surat, antara lain: Surat Keterangan Kelakuan Baik dan surat ijin Rame-rame, pemberantasan miras, penertiban pedagang kaki lima, penertiban pasar tumpah, penertiban baligo, pembinaan PKL, razia anak funk dan PSK, serta penertiban dan pembongkaran bangunan liar/bangli.
- Bekerjasama dengan kasi pembangunan dalam penerbitan perijinan baik IMB maupun perijinan lainnya terutama dalam hal persyaratan dan cek lokasi terhadap pemohon.
- Melaksanakan kegiatan peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
- Melaksanakan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada di wilayah Kecamatan
- Melaksanakan upaya pencegahan serta penanggulangan bencana alam, sadar hukum dan terpeliharanya hakl asasi manusia (HAM)
- Melaksanakan pembinaan terhadap masyarakat serta anggota Linmas Siaga Kecamatan dan Linmas Siaga Desa
- Melaksanakan pam jalur/lalin dalam acara kunjungan kerja pejabat
- Membantu penyaluran air bersih ke daerah bencana rawan kekeringan
- Monitoring pengamanan kegiatan penyaluran bantuan-bantuan ke desa- desa
- Melaksanakan pengamanan pelaksanaan vaksinasi bagi masyarakat
- Pemantauan/pengontrolan lokasi check point Pengawasan orang dalam perjalanan mudik di wilayah Kecamatan Cilengkrang

- Koordinasi ke desa-desa terkait data kekeringan
5. Pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat yaitu telah melaksanakan kegiatan, sebagai berikut:
- Pembinaan organisasi perempuan
 - Pembinaan TP PKK kaitan dengan 10 program pokok PKK
 - Monitoring dan evaluasi posyandu
 - Pembinaan desa wisata
 - Pembinaan, monitoring dan evaluasi Bumdesa dan UMKM
 - Monitoring, pembinaan, verifikasi, mengumpulkan dan mengarsipkan dokumen, rekomendasi, dan evaluasi terkait Dana Desa, Bantuan Gubernur, ADPD
 - Pembinaan P2TP2A dan melaksanakan sosialisasi kesetaraan gender, pembinaan perempuan dan perlindungan anak
 - Sosialisasi kecamatan sehat dan pemberdayaan masyarakat/ FKKS
 - Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Vaksinasi Masal bagi masyarakat kecamatan cilengkrang
 - Pembinaan dalam pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan pembangunan

Analisis Kinerja Pelayanan pada Kantor Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung berdasarkan Indikator Kinerja yang sudah ditentukan Renstra 2021-2026 dapat dilihat dari Tabel berikut :

Tabel TC 30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Cilengkrang

Kabupaten Bandung

Program /Kegiatan /subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	SPM	TARGET IKK	Target Kinerja					Realisasi Capaian Kinerja				Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025 (Tahun N)	2026 (Tahun N+1)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13	14	15
KECAMATAN															
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakiap Persentase BMD Dalam Kondisi Baik		Point	70 point 84 %	71 point 85 %	77 point 86%	80 point 87%	81 point 88 %		72,06 Poin 83,63%	76.08 point 85 %	79.80 point 84,89%	80 point 87%	81 point 88 %	
	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu		%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	3 dokumen		2 dokumen	2 dokumen	8 dokumen	2 dokumen	3 dokumen	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Dokumen	1 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		1 dokumen	1 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		Dokumen	na	na	na	1 Dokumen	1 Dokumen		na	na	na	1 Dokumen	1 Dokumen	
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah		Data	na	na	na	1 dokumen	1 dokumen		na	na	na	1 dokumen	1 dokumen	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu		%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	

Program /Kegiatan /subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	SPM	TARGET IKK	Target Kinerja						Realisasi Capaian Kinerja				Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025 (Tahun N)	2026 (Tahun N+1)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		orang / bulan	24 orang/bulan	24 orang/bulan	24 orang/bulan	24 orang/bulan	24 orang/bulan	24 orang/14 bulan	24 orang/14 bulan	24 orang/12 bulan	24 orang/bulan	24 orang/bulan			
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Dokumen	dokumen	dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	dokumen	Dokumen	NA	4 dokumen	4 dokumen			
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen			
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	1 dokumen	1 dokumen			
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD sesuai ketentuan		%	100%	100%	100%	100%	100%	90%	0%	100%	100%	100%			
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Dokumen	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan			
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian PAD		%	100%	100%	100%	100%	100%	20%	0%	0%	100%	100%			
	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah		Dokumen	12 laporan	12 laporan	laporan	laporan	laporan	5 laporan	laporan	laporan	laporan	laporan			
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase dokumen pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tepat waktu		68	100%	100%	100%	100%	100%	75%	0%	80%	100%	100%			
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		Paket	paket	paket	paket	1 paket	1 paket	paket	paket	PAKET	1 paket	1 paket			
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Dokumen	20 Dokumen	24 dokumen	24 dokumen	24 dokumen	24 dokumen	24 dokumen	Dokumen	6 dokumen	24 dokumen	24 dokumen			
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		orang	orang	24 orang	24 orang	orang	orang	orang	orang	orang	orang	orang			
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor		%	100%	100%	100%	100%	100%	90%	0%	75%	100%	100%			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Paket	1 Paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	12 paket	8 paket	1 paket	1 paket			
Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan kantor yang Disediakan		Paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	12 paket	10 paket	1 paket	1 paket			
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Paket	Paket	Paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	12 paket	6 paket	1 paket	1 paket			
Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Logistik		Paket	Paket	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	9 paket	12 paket	12 paket			
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	10 paket	9 paket	1 paket	1 paket			
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		Paket	1 paket	paket	paket	paket	paket	paket	paket	Paket	paket	paket			

Program /Kegiatan /subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	SPM	TARGET IKK	Target Kinerja						Realisasi Capaian Kinerja				Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025 (Tahun N)	2026 (Tahun N+1)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		Laporan	laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	1 Laporan	laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan	36 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	21 laporan	24 Laporan	24 Laporan			
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		%	83%	84%	85%	86%	87%	0%	0%	0%	86%	87%			
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		unit	unit	unit	unit	1 unit	1 unit	unit	unit	unit	1 unit	1 unit			
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		Paket	Paket	Paket	Paket	1 Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	1 Paket	Paket			
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		Unit	3 unit	unit	unit	unit	unit	unit	unit	unit	unit	unit			
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		Unit	unit	unit	unit	1 unit	1 unit	unit	unit	unit	1 unit	1 unit			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		%	100%	100%	100%	-	-	100%	-	100%	-	-			
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan			
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan			
Peneliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Dalam Kondisi Baik		%	83%	84%	85%	86%	87%	75%	0%	85%	86%	87%			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Pertiznannya		Unit	3 unit mobil 4 motor	3 unit mobil 4 motor	2 unit mobil 4 motor	2 unit mobil 4 motor	2 unit mobil 4 motor	2 unit mobil 4 motor	2 unit mobil / 4 unit motor	2 unit mobil 4 motor	2 unit mobil 4 motor	2 unit mobil 4 motor			
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Unit	8 unit/tahun	10 unit/tahun	10 unit/tahun	10 unit/tahun	10 unit/tahun	6 unit/tahun	8 unit / tahun	4 unit/tahun	10 unit/tahun	10 unit/tahun			
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Drehabilitasi		unit	Unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	unit	unit	unit	1 unit	1 unit			
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang di pelihara		unit	Unit	Unit	Unit	2 unit	2 unit	unit	unit	unit	2 unit	2 unit			
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat		Point	78 poin	80 poin	82 poin	84 poin	86 poin	86 poin	o poin	82 Poin	84 poin	86 poin			
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	50.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%			

Program /Kegiatan /subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	SPM	TARGET IKK	Target Kinerja						Realisasi Capaian Kinerja				Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025 (Tahun N)	2026 (Tahun N+1)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Laporan	6 laporan	0 laporan	0 laporan	0 laporan	0 laporan	1 laporan	0 laporan	0 laporan	0 laporan	0 laporan			
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak		%	100%	100%	100%	100%	100%	90%	0%	100%	100%	100%			
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan		Laporan	laporan	6 Laporan	-	-	-	laporan	-	laporan	-	-			
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Laporan	4 laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan			
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		%	100%	100%	100%	100%	100%	90%	0%	75%	100%	100%			
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		Dokumen	1 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	1 Laporan	3 Dokumen	1 Laporan	4 dokumen	4 dokumen			
Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta		unit	1 unit					1 Laporan		-					
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan		%	100%	100%	100%	100%	100%	85%	0%	100%	100%	100%			
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Laporan	9 laporan	9 laporan	9 laporan	9 laporan	7 laporan	7 laporan	8 laporan	3 Laporan	9 laporan	7 laporan			
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Indeks Kepuasan Masyarakat		Point	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0.00%	82 poin	100%	100%			
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa		%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0.00%	100%	100%	100%			
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Laporan	2 lembaga	2 lembaga	lembaga	lembaga	lembaga	2 lembaga	lembaga	lembaga	lembaga	lembaga			
Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kecamatan	Jumlah laporan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kecamatan		Laporan	laporan	laporan	laporan	laporan	laporan	laporan	laporan	laporan	laporan	laporan			
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 laporan	2 laporan	2 kegiatan			

Program /Kegiatan /subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	SPM	TARGET IKK	Target Kinerja						Realisasi Capaian Kinerja				Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025 (Tahun N)	2026 (Tahun N+1)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi		%	78.00	80.00	82.00	84.00	100%	100%	0%	80%	84.00	100%			
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya		Lembaga	1 Lembaga	2 lembaga	2 lembaga	2 lembaga	2 lembaga	laporan	2 Laporan	2 lembaga	2 lembaga	2 lembaga			
Facilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		Laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	3 Laporan	laporan	1 laporan	1 laporan			
Facilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		Laporan	laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	Laporan	Laporan	1 laporan	1 laporan			
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		%		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara		Keluarga	Keluarga	Keluarga	Keluarga	30 Keluarga	30 Keluarga	kelurga	kelurga	kelurga	30 Keluarga	30 Keluarga			
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat		Keluarga	Keluarga	Keluarga	Keluarga	30 Keluarga	30 Keluarga	kelurga	kelurga	kelurga	30 Keluarga	30 Keluarga			
Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga		Keluarga	Keluarga	Keluarga	Keluarga	30 Keluarga	30 Keluarga	kelurga	kelurga	kelurga	30 Keluarga	30 Keluarga			
Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri		Keluarga	Keluarga	Keluarga	Keluarga	30 Keluarga	30 Keluarga	kelurga	kelurga	kelurga	30 Keluarga	30 Keluarga			
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah		Keluarga	Keluarga	Keluarga	Keluarga	30 Keluarga	30 Keluarga	kelurga	kelurga	kelurga	30 Keluarga	30 Keluarga			
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Sang	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Sang		Keluarga	Keluarga	Keluarga	Keluarga	30 Keluarga	30 Keluarga	kelurga	kelurga	kelurga	30 Keluarga	30 Keluarga			

Program /Kegiatan /subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	SPM	TARGET IKK	Target Kinerja						Realisasi Capaian Kinerja				Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025 (Tahun N)	2026 (Tahun N+1)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat		Keluarga	Keluarga	Keluarga	Keluarga	30 Keluarga	30 Keluarga	keluarga	keluarga	keluarga	30 Keluarga	30 Keluarga	30 Keluarga		
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya		Keluarga	Keluarga	Keluarga	Keluarga	30 Keluarga	30 Keluarga	keluarga	keluarga	keluarga	30 Keluarga	30 Keluarga	30 Keluarga		
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup		Keluarga	Keluarga	Keluarga	Keluarga	30 Keluarga	30 Keluarga	keluarga	keluarga	keluarga	30 Keluarga	30 Keluarga	30 Keluarga		
Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam		Keluarga	Keluarga	Keluarga	Keluarga	30 Keluarga	30 Keluarga	keluarga	keluarga	keluarga	30 Keluarga	30 Keluarga	30 Keluarga		
Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga		Keluarga	Keluarga	Keluarga	Keluarga	30 Keluarga	30 Keluarga	keluarga	keluarga	keluarga	30 Keluarga	30 Keluarga	30 Keluarga		
Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas		Keluarga	Keluarga	Keluarga	Keluarga	30 Keluarga	30 Keluarga	keluarga	keluarga	keluarga	30 Keluarga	30 Keluarga	30 Keluarga		
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Indeks Kepuasan Masyarakat		Point	78.00	80.00	82.00	84.00	100%	78.00	80.00	82 poin	84.00	100%	100%		
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		%	100%	8000%	8200%	8400%	100%	100%	0%	0%	8400%	100%	100%		
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Laporan	6 laporan	6 laporan	6 laporan	6 laporan	6 laporan	2 laporan	2 laporan	laporan	6 laporan	6 laporan	6 laporan		
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	70%	100%	100%	100%		
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	9 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan		
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Indeks Kepuasan Masyarakat		Point	78.00	80.00	82.00	84.00	100%	78.00	80.00	82 poin	84.00	100%	100%		

Program /Kegiatan /subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	SPM	TARGET IKK	Target Kinerja						Realisasi Capaian Kinerja				Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025 (Tahun N)	2026 (Tahun N+1)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%			
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Menantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Ketuhanan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Menantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Ketuhanan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Orang	300 Orang	-	-	-	-	270 orang	-	-	-	-			
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		Orang	-	300 Orang	300 Orang	300 Orang	300 Orang	orang	220 orang	300 Orang	300 Orang	300 Orang			
Pembinaan Kerukunan Antar-suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		Orang	300 Orang	300 Orang	300 Orang	300 Orang	300 Orang	270 orang	150 orang	300 Orang	300 Orang	300 Orang			
Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		Dokumen	dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	dokumen	1 Dokumen	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen			
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		Dokumen		12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	laporan	12 Dokumen	12 dokumen	12 laporan	12 laporan			
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi		%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%			
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang dibina		%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%			
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6 Dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen			
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		Dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	4 Dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen			
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 dokumen	4 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	Dokumen	Dokumen	4 Dokumen	0 Dokumen			

Program /Kegiatan /subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	SPM	TARGET IKK	Target Kinerja						Realisasi Capaian Kinerja				Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025 (Tahun N)	2026 (Tahun N+1)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan		Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		
Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan		Laporan	-	1 laporan	1 laporan	1 laporan	0 Dokumen	0 Dokumen	Dokumen	Dokumen	1 laporan	0 Dokumen	0 Dokumen		

2.3. Isu-Isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Cilengkrang

Berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Nomor. 1 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung serta Peraturan Bupati No. 120 tahun 2023 tentang Pedoman Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Kecamatan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, kedudukan kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah yang dipimpin oleh Camat, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan tugas umum pemerintahan serta urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan.

Kinerja pelayanan kecamatan erat kaitannya dengan tugas dan fungsi Kecamatan sebagaimana diatur pada Peraturan Bupati No. 120 tahun 2023 tentang Pedoman Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Kecamatan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung dan Peraturan Bupati Bandung No.1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung

Dalam menyelenggarakan pemerintahan, Kecamatan Cilengkrang mengidentifikasi beberapa isu strategis di beberapa bidang, diantaranya adalah:

1. Pelayanan adminitrasi kependudukan terkendala pada penyediaan Blanko dan ribbon E KTP
2. Adanya perubahan tentang ijin mendirikan bangunan belum dibarengi dengan peraturan daerah Kabupaten Bandung dan peraturan Bupati Bandung.
3. Adanya Kepmendagri 050_5889 berakibat kepada perlunya penyesuaian tugas pokok dan fungsi kecamatan, penambahan SDM dan anggaran.
4. Belum sesuai penempatan pegawai dengan kompetensi pendidikan dan pola karir yang jelas.
5. Pemahaman pegawai terkait standar akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan masih rendah
6. Desa di wilayah Kecamatan Cilengkrang baru ada 3 desa berkembang dan 3 desa maju, belum ada desa mandiri.
7. Pelaksanaan adminitrasi Pengelolaan bantuan keuangan desa belum masuk kategori baik terlihat hasil pembinaan dan pengawasan, masih terjadi keterlambatan peng SPJ an.

8. Belum optimalnya kondisi keamanan, ketentraman dan ketertiban di lingkungan masyarakat karena pandemi covid 19 dan resesi ekonomi
9. Pengelolaan Bumdes yang ada di desa desa belum optimal dan berkontribusi positif bagi pemerintah desa dan masyarakat desa.
10. Belum optimalnya pengelolaan dan penanganan sampah
11. Masih kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan sampah
12. Belum adanya fasilitas sosial dan fasilitas umum dari perumahan/komplek yang diserahkan kepada pemerintah desa ataupun kabupaten dengan kondisi fasos dan fasum dengan keadaan kurang baik.
13. Data masyarakat penyandang masalah sosial belum tersedia dengan baik sesuai dengan kondisi riil di masyarakat
14. Data Rumah Tidak layak huni belum tersedia dengan baik
15. Terdapat sumber mata air yang dikelola oleh pihak swasta dan perorangan
16. Meningkatnya kemiskinan akibat adanya pandemi covid 19
17. Fasilitasi dan pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan belum optimal
18. Mulai lunturnya budaya gotong royong dan kesetiakawanan sosial
19. Sarana dan Prasarana pendukung bagi kelancaran pelaksanaan tugas yang ada di Kecamatan Cilengkrang masih kurang dan keadaan peralatan dan perlengkapan kantor banyak yang rusak berat dan juga Gedung kantor, rumah dinas dan Gedung olahraga kecamatan kondisinya rusak berat dan belum adanya penambahan anggaran untuk rehabilitasi/perbaikan dari tahun 2019.
20. Petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis mengenai pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dari Bupati kepada Camat belum maksimal.

Melihat permasalahan di atas, Kecamatan Cilengkrang melakukan upaya penanganan, antara lain:

1. Pengkoordinasian dengan dinas kependudukan dan catatan sipil untuk penyediaan blanko dan ribbon e KTP
2. Memberikan pendidikan/pelatihan-pelatihan yang sesuai dengan kapasitasnya serta penempatan pegawai yang berkompeten
3. Meminta kepada Pemerintah kabupaten bandung untuk menganalisa dan mengevaluasi tufoksi kecamatan pasca adanya Permen PANRB tentang Penyederhanaan dan penyetaraan birokrasi serta tata hubungan kerja penyelenggara pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten

Bandung

4. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan yang lebih intensif untuk tertib adminitrasi dan meningkatkan status desa
5. Memaksimalkan kerjasama dengan aparat keamanan terutama dengan polsek dan koramil, serta meningkatkan patrol wilayah
6. Sosialisasi penanganan masalah sampah ke masyarakat serta perbaikan manajemen bagi pengelolaan sampah di Kecamatan Cilengkrang
7. Peningkatan pengadaan sarana dan pengelolaan sampah yang dilaksanakan rutin setiap tahun
8. Pembinaan dan Pengawasan kepada bumdes serta Pembinaan dan Pengawasan kepada UMKM secara intensif melalui program dana bergulir
9. Melakukan pendekatan kepada para pengembang perumahan untuk menyiapkan fasos dan fasum dan adminitrasi sebagai syarat penyerahan fasos fasum kepada pemerintah.
10. Melaksanakan tertib adminitrasi dalam pengelolaan data, rumah berijin. Rumah tidak layak huni.
11. Melaksanakan tertib adminitrasi dalam pengelolaan data masyarakat penyandang masalah sosial
12. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan kepada lembaga kemasyarakatan
13. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi kepada dinas terkait dalam hal penganggulangan masalah sosial di masyarakat
14. Mendorong pemerintah desa untuk membeli asset masyarakat yang mempunyai potensi sumber air bersih untuk di kelola oleh desa.
15. Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran kegiatan kecamatan dengan memohon anggaran pengadaan peralatan perlengkapan kantor serta perbaikan/rehabilitasi Gedung kantor, rumah dinas dan Gedung olahraga dari tahun 2019 kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Namun sampai tahun 2023 belum diberikan penambahan anggaran.
16. Selain permohonan penambahan anggaran untuk penambahan, perbaikan / rehab sarana dan prasarana kantor kecamatan, diperlukan juga adanya penambahan operasional bagi kecamatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan serta pelimpahan kewenangan dari bupati kepada camat.
17. Memaksimalkan peran kecamatan sebagai Perangkat Daerah dengan

mengimplementasikan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis mengenai pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dari Bupati kepada Camat

Kecamatan sebagai pelaksana Pemerintah Daerah di lingkungan Kecamatan, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Sekretariat, seksi, dan kelompok jabatan fungsional menurut lingkup tugasnya masing-masing. Camat baik teknis operasional maupun teknis administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan Perangkat Daerah/instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Nomor. 1 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung serta Peraturan Bupati No. 120 tahun 2023 tentang Pedoman Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Kecamatan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, kedudukan kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah yang dipimpin oleh Camat, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan tugas umum pemerintahan serta urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan.

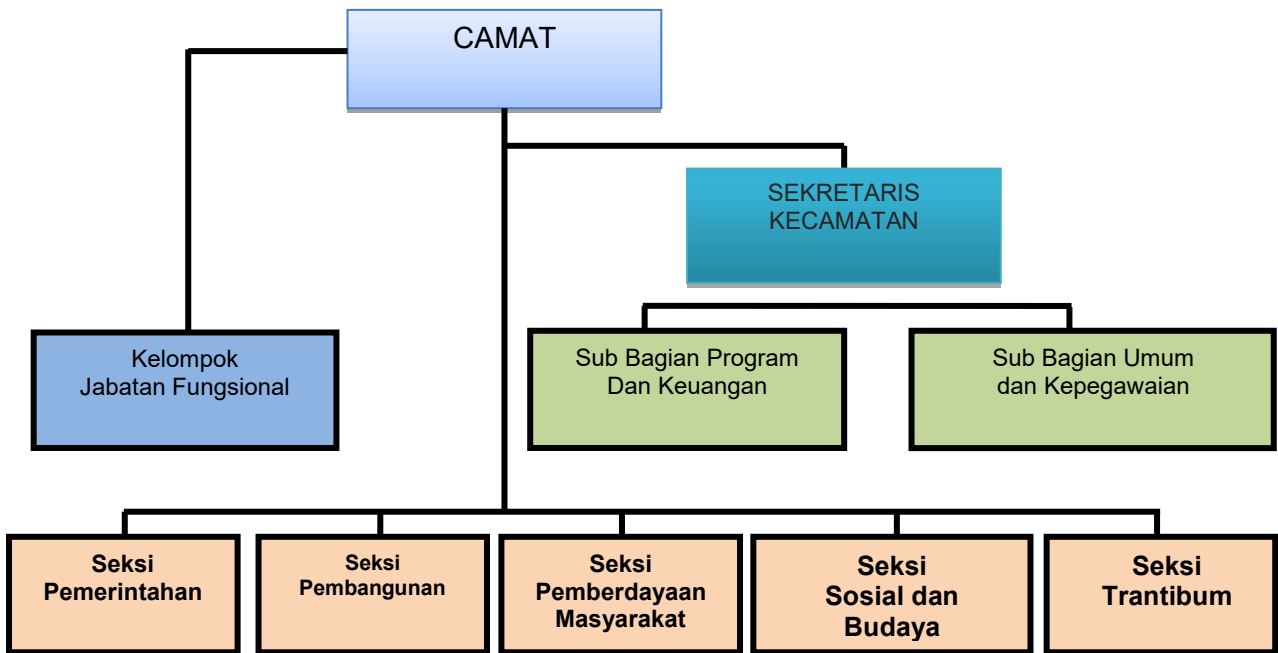
Untuk melaksanakan tugas pokok dan kewajibannya, Kecamatan Cilengkrang mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan, pengaturan, pengkoordinasian, pembinaan dan pelaksanaan kebijakan umum dan teknis operasional bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, pembangunan dan sosial budaya;
- b. Penyelenggaraan pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan tugas bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, pembangunan dan sosial budaya;
- c. Penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya, dan
- d. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Kecamatan;

Sedangkan uraian tugas masing-masing unit Organisasi pada Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung diatur dalam Peraturan Bupati

Bandung Nomor 39 tahun 2022. Untuk Wilayah Kecamatan Cilengkrang Camat membawahkan :

- a. Sekretariat
- b. Seksi Pemerintahan
- c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- e. Seksi Pembangunan
- f. Seksi Sosial Budaya
- g. Kasubag Umum dan Kepegawaian
- h. Kasubag Program dan Keuangan
- i. Jabatan Fungsional



2.4 Reviu Terhadap Rancangan Akhir RKPD

Review Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2025 sesuai dengan pagu indikatif hasil Desk yang dilaksanakan dengan Bappelitbangda, Bagian Organisasi, Kabupaten Bandung pada bulan Maret sampai dengan Mei 2025 dimana dilaksanakan pergeseran anggaran dari program, kegiatan dan subkegiatan untuk menutup kebutuhan anggaran kegiatan belanja wajib mengikat dan anggaran kegiatan prioritas Bupati Bandung dari anggaran operasional rutin dan kegiatan rutin kecamatan.

Tentunya hal ini akan mengganggu kegiatan rutin kecamatan dan analisis kebutuhan masing-masing Bagian di lingkungan Kecamatan Cilengkrang. Dan untuk menutupi kekurangan anggaran akan dilakukan usulan penambahan anggaran dalam Rancangan Akhir Renja Kecamatan

Cilengkrang Tahun 2025. Termasuk didalamnya akan diusulkan Kembali penambahan anggaran untuk rehab berat / perbaikan Gedung kantor, Gedung rumah dinas dan Gedung olahraga Kecamatan Cilengkrang yang semenjak tahun 2019 dilakukan pengusulan namun belum direalisasikan oleh Tim Anggaran pemerintah Daerah, serta penambahan anggaran untuk menutupi belanja jasa pelayanan kantor gaji pegawai Non ASN ke 13 dan 14.

Banyaknya Program Prioritas Bupati Bandung yang menitikberatkan kepada peran kecamatan sebagai garda terdepan dalam pelayanan publik belum di sinkronisasi dengan kegiatan dari perangkat daerah lainnya yang menjadikan kecamatan sebagai obyek kegiatan dengan beban operasional kepada kecamatan, sehingga sangat memberatkan kepada anggaran yang ada pada kecamatan.

Adapun review atas Rancangan Akhir RKPD terhadap Renja Kecamatan Cilengkrang Tahun 2025 sebagaimana pada Tabel C-31 dibawah ini

T- C. 31

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025

KABUPATEN BANDUNG

NO	RANCANGAN AWAL RKPD 2025					HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATOR	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATOR
Meningkatnya Kualitas	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec Cilengkrang	Nilai SAKIP BMD dalam Keadaan Baik	80 point 86 %	5,567,716,233	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec Cilengkrang	Nilai SAKIP BMD dalam Keadaan Baik	80 point 86 %	5,567,716,233
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec Cilengkrang	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	100%	42,548,800	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec Cilengkrang	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	100%	42,548,800
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec Cilengkrang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	12,863,600	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec Cilengkrang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	12,863,600
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec Cilengkrang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3,648,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec Cilengkrang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3,648,000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Kec Cilengkrang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4,702,500	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Kec Cilengkrang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4,702,500
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kec Cilengkrang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2,005,500	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kec Cilengkrang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2,005,500
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kec Cilengkrang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	4,385,500	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kec Cilengkrang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	4,385,500
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec Cilengkrang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	4,060,500	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec Cilengkrang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	4,060,500
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec Cilengkrang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	8,374,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec Cilengkrang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	8,374,000
	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kec Cilengkrang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	1,254,600	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kec Cilengkrang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	1,254,600
	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kec Cilengkrang	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Dokumen	1,254,600	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kec Cilengkrang	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Dokumen	1,254,600
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec Cilengkrang	Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	100%	4,999,313,548	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec Cilengkrang	Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	100%	4,999,313,548
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec Cilengkrang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 orang/bulan	4,987,843,048	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec Cilengkrang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 orang/bulan	4,987,843,048
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kec Cilengkrang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4 dokumen	4,330,000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kec Cilengkrang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4 dokumen	4,330,000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec Cilengkrang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dokumen	4,325,500	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec Cilengkrang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dokumen	4,325,500
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kec Cilengkrang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4 dokumen	2,815,000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kec Cilengkrang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4 dokumen	2,815,000
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kec Cilengkrang	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD sesuai ketentuan	100%	2,800,000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kec Cilengkrang	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD sesuai ketentuan	100%	2,800,000
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec Cilengkrang	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 laporan	2,800,000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec Cilengkrang	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 laporan	2,800,000
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Kec Cilengkrang	Persentase Capaian PAD	100%	0	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Kec Cilengkrang	Persentase Capaian PAD	100%	0
	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kec Cilengkrang	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	laporan	0	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kec Cilengkrang	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	laporan	0
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec Cilengkrang	persentase dokumen pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tepat waktu	100%	32,296,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec Cilengkrang	persentase dokumen pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tepat waktu	100%	32,296,000
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kec Cilengkrang	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 paket	22,000,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kec Cilengkrang	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 paket	22,000,000
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kec Cilengkrang	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	24 dokumen	10,296,000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kec Cilengkrang	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	24 dokumen	10,296,000
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec Cilengkrang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	0	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec Cilengkrang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	0
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec Cilengkrang	Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor	100%	111,110,650	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec Cilengkrang	Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor	100%	111,110,650
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec Cilengkrang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 paket	5,999,200	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec Cilengkrang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 paket	5,999,200

NO	RANCANGAN AWAL RKPd 2025					HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATOR	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATOR
	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Kec Cilengkrang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 paket	74,148,900	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Kec Cilengkrang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 paket	74,148,900
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec Cilengkrang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 paket	5,474,980	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec Cilengkrang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 paket	5,474,980
	Penyediaan Bahan Logistik	Kec Cilengkrang	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Logistik	12 paket	11,998,400	Penyediaan Bahan Logistik	Kec Cilengkrang	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Logistik	12 paket	11,998,400
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec Cilengkrang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	6,039,170	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec Cilengkrang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	6,039,170
	Penyediaan Bahan/Material	Kec Cilengkrang	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	paket	0	Penyediaan Bahan/Material	Kec Cilengkrang	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	paket	0
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec Cilengkrang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 laporan	6,000,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec Cilengkrang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 laporan	6,000,000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec Cilengkrang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	1,450,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec Cilengkrang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	1,450,000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec Cilengkrang	Persentase dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0%	0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec Cilengkrang	Persentase dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0%	0
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec Cilengkrang	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit	0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec Cilengkrang	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit	0
	Pengadaan Mebel	Kec Cilengkrang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	paket	-	Pengadaan Mebel	Kec Cilengkrang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	paket	-
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec Cilengkrang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec Cilengkrang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	-
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec Cilengkrang	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	0	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec Cilengkrang	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	0
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec Cilengkrang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec Cilengkrang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	0
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec Cilengkrang	Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	210,408,885	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec Cilengkrang	Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	210,408,885
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec Cilengkrang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	26,331,285	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec Cilengkrang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	26,331,285
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec Cilengkrang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	184,077,600	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec Cilengkrang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	184,077,600
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec Cilengkrang	Persentase BMD Dalam Kondisi Baik	86%	169,238,350	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec Cilengkrang	Persentase BMD Dalam Kondisi Baik	86%	169,238,350
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec Cilengkrang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 unit mobil, 4 motor, 1 Torca	69,388,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec Cilengkrang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 unit mobil, 4 motor, 1 Torca	69,388,000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec Cilengkrang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 unit/tahun	9,460,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec Cilengkrang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 unit/tahun	9,460,000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec Cilengkrang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	90,390,350	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec Cilengkrang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	90,390,350
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec Cilengkrang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang di pelihara	unit	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec Cilengkrang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang di pelihara	unit	0
	Jumlah 1				5,567,716,233	Jumlah 1				5,567,716,233
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec Cilengkrang	Indeks Kepuasan Masyarakat	84 poin	249,129,605	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec Cilengkrang	Indeks Kepuasan Masyarakat	84 poin	249,129,605
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec Cilengkrang	Persentase koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100.00%	0	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec Cilengkrang	Persentase koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100.00%	0
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec Cilengkrang	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0 laporan	0	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec Cilengkrang	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0 laporan	0

NO	RANCANGAN AWAL RKPD 2025					HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATOR	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATOR
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kec Cilengkrang	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan guna Mendukung Pelayanan Prima kepada Masyarakat di Kecamatan	100%	54,080,000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kec Cilengkrang	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan guna Mendukung Pelayanan Prima kepada Masyarakat di Kecamatan	100%	54,080,000
	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kec Cilengkrang	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	-	0	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kec Cilengkrang	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	-	0
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec Cilengkrang	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	54,080,000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec Cilengkrang	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	54,080,000
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kec Cilengkrang	Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	100%	33,473,000	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kec Cilengkrang	Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	100%	33,473,000
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kec Cilengkrang	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	2 dokumen	33,473,000	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kec Cilengkrang	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	2 dokumen	33,473,000
	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Kec Cilengkrang	Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta		0	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Kec Cilengkrang	Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta		0
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec Cilengkrang	Persentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan	100%	161,576,605	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec Cilengkrang	Persentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan	100%	161,576,605
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Cilengkrang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	161,576,605	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Cilengkrang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	161,576,605
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec Cilengkrang	Indeks Kepuasan Masyarakat	84 poin	74,337,000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec Cilengkrang	Indeks Kepuasan Masyarakat	84 poin	74,337,000
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec Cilengkrang	Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	100%	19,912,000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec Cilengkrang	Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	100%	19,912,000
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec Cilengkrang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-	0	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec Cilengkrang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-	0
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kecamatan	Kec Cilengkrang	Jumlah laporan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kecamatan	laporan	0	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kecamatan	Kec Cilengkrang	Jumlah laporan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kecamatan	laporan	0
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec Cilengkrang	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	19,912,000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec Cilengkrang	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	19,912,000
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kec Cilengkrang	persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi	100%	19,025,000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kec Cilengkrang	persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi	100%	19,025,000
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kec Cilengkrang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2 lembaga	15,450,000	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kec Cilengkrang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2 lembaga	15,450,000
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec Cilengkrang	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 laporan	3,575,000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec Cilengkrang	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 laporan	3,575,000
	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kec Cilengkrang	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	laporan	0	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kec Cilengkrang	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	laporan	0
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	100%	35,400,000	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	100%	35,400,000
	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Kec Cilengkrang	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga	0	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Kec Cilengkrang	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga	0
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Kec Cilengkrang	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	0	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Kec Cilengkrang	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	0
	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kec Cilengkrang	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	30 Keluarga	3,900,000	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kec Cilengkrang	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	30 Keluarga	3,900,000
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Kec Cilengkrang	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Keluarga	0	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Kec Cilengkrang	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Keluarga	0

NO	RANCANGAN AWAL RKPD 2025					HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATOR	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATOR
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Kec Cilengkrang	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Keluarga	0	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Kec Cilengkrang	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Keluarga	0
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kec Cilengkrang	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	30 Keluarga	7,140,000	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kec Cilengkrang	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	30 Keluarga	7,140,000
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kec Cilengkrang	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	30 Keluarga	3,900,000	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kec Cilengkrang	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	30 Keluarga	3,900,000
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Kec Cilengkrang	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	30 Keluarga	3,900,000	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Kec Cilengkrang	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	30 Keluarga	3,900,000
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Kec Cilengkrang	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarga	0	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Kec Cilengkrang	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarga	0
	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Kec Cilengkrang	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	30 Keluarga	3,900,000	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Kec Cilengkrang	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	30 Keluarga	3,900,000
	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Kec Cilengkrang	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Keluarga	0	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Kec Cilengkrang	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Keluarga	0
	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Kec Cilengkrang	Jumlah Keluarga yang Mengikuti penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	30 Keluarga	12,660,000	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Kec Cilengkrang	Jumlah Keluarga yang Mengikuti penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	30 Keluarga	12,660,000
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec Cilengkrang	Indeks Kepuasan Masyarakat	84 Poin	48,540,000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec Cilengkrang	Indeks Kepuasan Masyarakat	84 Poin	48,540,000
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec Cilengkrang	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	8,940,000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec Cilengkrang	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	8,940,000
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec Cilengkrang	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 laporan	8,940,000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec Cilengkrang	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 laporan	8,940,000
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kec Cilengkrang	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100%	39,600,000	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kec Cilengkrang	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100%	39,600,000
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec Cilengkrang	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 laporan	39,600,000	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec Cilengkrang	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 laporan	39,600,000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec Cilengkrang	Indeks Kepuasan Masyarakat	84 Poin	116,788,600	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec Cilengkrang	Indeks Kepuasan Masyarakat	84 Poin	116,788,600
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penuasan Kepala Daerah	Kec Cilengkrang	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penuasan Kepala Daerah	100%	116,788,600	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penuasan Kepala Daerah	Kec Cilengkrang	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penuasan Kepala Daerah	100%	116,788,600
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec Cilengkrang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	-	-	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec Cilengkrang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	-	-
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec Cilengkrang	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	300 orang	39,820,000	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec Cilengkrang	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	300 orang	39,820,000
	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kec Cilengkrang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	300 orang	37,019,600	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kec Cilengkrang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	300 orang	37,019,600
	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Kec Cilengkrang	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	1 dokumen	9,385,000	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Kec Cilengkrang	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	1 dokumen	9,385,000
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec Cilengkrang	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 dokumen	30,564,000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec Cilengkrang	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 dokumen	30,564,000
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec Cilengkrang	Jumlah Desa Berkategori Baik	1 Desa	51,323,900	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec Cilengkrang	Jumlah Desa Berkategori Baik	1 Desa	51,323,900
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec Cilengkrang	Persentase desa yang dibina	100%	51,323,900	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec Cilengkrang	Persentase desa yang dibina	100%	51,323,900

NO	RANCANGAN AWAL RKPД 2025					HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATOR	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATOR
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec Cilengkrang	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	6 dokumen	13,394,800	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec Cilengkrang	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	6 dokumen	13,394,800
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec Cilengkrang	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	6 dokumen	13,394,800	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec Cilengkrang	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	6 dokumen	13,394,800
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kec Cilengkrang	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0 Dokumen	0	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kec Cilengkrang	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0 Dokumen	0
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec Cilengkrang	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	24,534,300	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec Cilengkrang	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	24,534,300
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kec Cilengkrang	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	0 Dokumen	0	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kec Cilengkrang	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	0 Dokumen	0
	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Kec Cilengkrang	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	0 Dokumen	0	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Kec Cilengkrang	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	0 Dokumen	0
					540,119,105					540,119,105
					6,107,835,338					6,107,835,338

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional, sistem perencanaan pembangunan propinsi serta sistem perencanaan pembangunan Kabupaten Bandung. Oleh karena itu, Rencana Kerja Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung berpedoman pada Rencana Strategis Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung dengan mengacu pada Peraturan Bupati Bandung Nomor 93 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Tahun Anggarabn 2025, sehingga dapat dikatakan bahwa Rencana Kerja Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung bersinergi dengan dokumen perencanaan lain, baik Nasional, seperti RPJP Nasional, RPJM Nasional, RKP Nasional; maupun di tingkat Provinsi, seperti RPJP Provinsi Jawa Barat 2005–2025, RPJPD Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa perumusan visi dan misi RPJMD selain merupakan pemjabaran dari visi dan misi Bupati terpilih, juga harus mengacu kepada RPJPD. Dalam menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan, maka visi RPJMD Kabupaten Bandung harus mengacu kepada visi RPJPD Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025, RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2003-2023, dan RPJP Nasional Tahun 2004-2024 sebagai berikut.

Tabel 5-1

Visi RPJPD, RPJP Nasional DAN RPJPD Provinsi Jawa Barat

RPJP Nasional (Tahun 2004-2024)	RPJPD Provinsi Jawa Barat (Tahun 2003-2023)	RPJPD Kabupaten (2005-2025)
"Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur"	"Dengan Iman dan Takwa, Provinsi Jawa Barat Termaju di Indonesia"	"Kabupaten Bandung yang Repeh, Rapih, Kerta Raharja Tahun 2025"

Sumber: RPJP Nasional 2004-2024,RPJPD Provinsi Jawa Barat 2003-2023 dan RPJPD Kabupaten Bandung 2005-2025

Dalam mewujudkan visi RPJPD Kabupaten Bandung tahun 2005-2025, terdapat 6 (enam) misi sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan Kabupaten Bandung yang Aman dan Tertib

- 2) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
- 3) Meningkatkan Daya Dukung dan Kualitas Lingkungan
- 4) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
- 5) Menciptakan Pemerataan Pembangunan dan Berkeadilan
- 6) Mewujudkan Perekonomian Masyarakat yang Berdaya Saing

Pada masing-masing dokumen perencanaan RPJP di tiap levelnya, RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 melihat kepada arahan kebijakan pembangunan RPJP yang ada ditahap ke-IV. Berikut merupakan arahan kebijakan pada tahap IV di masingmasing perencanaan jangka panjang.

Tabel 5-2
Arahan Kebijakan RPJPD, RPJP Nasional
Dan RPJPD Provinsi Jawa Barat

RPJP Nasional (Tahun 2004-2024)	RPJPD Provinsi Jawa Barat (Tahun 2003-2023)	RPJPD Kabupaten (2005-2025)
Tahap IV (2020-2024) Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing	Tahap IV (2018-2023) Memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan maksud sebagai persiapan dalam mencapai kemandirian masyarakat Jawa Barat dalam segala bidang	Tahap IV (2021-2025) Pemantapan perekonomian daerah yang kokoh, adil, dan berkelanjutan dalam mencapai kesejahteraan masyarakat dan pemerata Pembangunan

Terkait dengan kebijakan nasional, Kecamatan Cilengkrang sebagai unsur penunjang pemerintah daerah Kabupate Bandung, masuk dalam prioritas nasional ke 1 yaitu **Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola**, dengan arah kebijakan sebgai berikut :

- 1) Penataan kelembagaan birokrasi pemerintah melalui konsolidasi structural berdasarkan tugas pokok dan fungsi instansi pemerintah, peningkatan kualitas reformasi birokrasi, perbaikan tata lakksana (*business process*), pengembangan manajemen SDM aparatur, dan pencapaian kinerja secara optimal.

- 2) Penataan otonomi daerah melalui percepatan penerapan standar pelayanan minimal untuk mendukung pengelolaan urusan yang lebih baik, peningkatan kapasitas keuangan pemerintah daerah.
- 3) Percepatan dan pencapaian target Millenium Development Goal's (MDG'S)
- 4) Percepatan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan daerah hingga tercapai keselarasan arah dalam implementasi pembangunan
- 5) Penetapan dan penerapan system indicator inerja utama pelayanan publik yang selaras antara pemerintah pusat dan daerah
- 6) Peningkatan integritas dan integritas penerapan dan penegakan hukum melalui peningkatan kinerja penegakan hokum dan pemberantasana korupsi sehingga kepercayaan masyarakat makin meningkat,

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.2.1. Visi dan Misi

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana Instansi Pemerintah harus dibawa dan berkarya, agar konsisten dan dapat Eksis, Antisipasif, Inovatif serta Produktif. Visi tidak lain adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Instansi Pemerintah.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang serta isu-isu strategis, maka visi Kabupaten Bandung Tahun 2021- 2026 adalah: **“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung yang Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, dan Sejahtera”**

Penjabaran makna yang terkandung dalam visi tersebut adalah sebagai berikut :

Bangkit : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung yang Bangkit adalah memberdayakan masyarakat menuju perubahan sosial ekonomi secara nyata dan bertahap melalui program pembangunan yang dirancang secara sektoral dan regional yang berdampak signifikan terhadap penanggulangan kemiskinan dan peningkatan daya beli.

Edukatif : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung yang Edukatif, yang dimaksud adalah kondisi masyarakat dan aparatur memiliki motivasi, semangat, dan etos kerja yang prima atau "Bedas" di segala bidang untuk

kemajuan Kabupaten Bandung, menuju Sumber Daya Manusia yang berkualitas melalui optimalisasi aspek pelayanan pendidikan dan kesehatan.

Dinamis : Terwujudnya Pembangunan Kabupaten Bandung yang Dinamis, yang dimaksud adalah terselenggaranya kegiatan pembangunan baik fisik maupun non fisik di Kabupaten Bandung yang memperhatikan kaidah-kaidah pembangunan yang berwawasan lingkungan, yang memperhatikan tata ruang dan keseimbangan alam. Pembangunan berkelanjutan juga diartikan sebagai :

- (i) Pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan;
- (ii) Pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat dan Pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup masyarakat dengan tata kelola pelaksanaan pembangunan yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Agamis : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung yang Agamis, yang dimaksud adalah kondisi masyarakat Kabupaten Bandung yang masyarakatnya dan aparaturnya bersih dan berwibawa berakhlak mulia berlandaskan nilai-nilai religiusitas keagamaan.

Sejahtera : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung yang Sejahtera, yang dimaksud adalah kondisi masyarakat Kabupaten Bandung yang dapat terpenuhi kebutuhan dasar meliputi sandang, pangan, papan dan memperoleh pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan secara layak serta terbukanya kesempatan kerja yang luas dan mampu menyerap tenaga kerja dengan penghasilan memadai.

Berdasarkan visi pembangunan yang ada, dalam rangka mewujudkan visi tersebut maka dirumuskan misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 dengan mengacu rumusan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang diselaraskan dengan misi RPJPD. Misi pembangunan berikut akan menjadi acuan dalam pembuatan program serta kegiatan dalam 5 (lima) tahun kedepan sebagai berikut :

- 1) Membangkitkan Daya Saing Daerah
- 2) Menyediakan layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan merata
- 3) Mengoptimalkan pembangunan daerah berbasis partisipasi masyarakat yang menjunjung tinggi kreatifitas dalam bingkai kearifan lokal dan berwawasan lingkungan

- 4) Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan melalui birokrasi yang professional, dan tata kehidupan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan
- 5) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan prinsip keadilan dan keberpihakan pada kelompok masyarakat lemah

3.2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Pemerintahan Daerah di wilayah Kecamatan Cilengkrang telah merumuskan tujuan dan sasaran strategis yang merupakan bagian Integral dalam proses Rencana Strategis organisasi dengan mengacu kepada Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Ranhir RKPD 2024)

Pemerintahan Kecamatan Cilengkrang telah merumuskan tujuan dan sasaran strategis yang merupakan bagian Integral dalam proses Rencana Strategis organisasi dengan mengacu kepada Renstra Kecamatan Cilengkrang Tahun 2021-2026

Visi	Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung yang Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera		
Misi IV	Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan melalui birokrasi yang professional, dan tata kehidupan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah	Meningkatnya kualitas kinerja Aparatur dan Penyelenggaran Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas dan kapasitas kinerja aparatur Pelayan Publik	Optimalisasi kualitas dan kapasitas Sumberdaya Pelayan Publik
Meningkatnya kualitas pelayanan public	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Optimalisasi pelayanan publik
	Meningkatnya kualitas Tata Kelola pemerintahan desa	Meningkatkan kualitas tata Kelola pemerintahan desa	Otimalisasi peningkatan kualitas Aparatur pemerintahan desa

3.2 Program dan Kegiatan

Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan di Kabupaten Bandung menuntut adanya peningkatan pelayanan publik ditandai dengan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan pada semua aspek kehidupan, pembangunan dan kemasyarakatan. untuk merespons tuntutan tersebut

perlu dilakukan upaya reformasi manajemen sektor publik dengan melakukan upaya: reengineering, revitalisasi, restrukturisasi birokrasi kearah organisasi yang lebih modern, dengan meredisain sejumlah proses pemerintahan dan merubah reorientasi organisasi kearah organisasi yang lebih antisipatif, responsif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis. Guna menghadapi tantangan termaksud perlu melakukan sejumlah pengelolaan layanan publik terutama terhadap prosedur dan budaya perilaku aparatur yang menghambat kualitas pelayanan.

Disamping itu penyusunan program dan kegiatan kecamatan yang tercantum dalam Perubahan Renstra Kecamatan Tahun 2021-2026 yang disusun pada Januari 2024 sebagaimana amanat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.15.5.1317 tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah belum menyesuaikan jumlah anggaran yang dibutuhkan sedangkan program, kegiatan dan subkegiatan bertambah, sehingga mengganggu pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Hal ini terjadi karena belum dilaksanakannya perubahan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026.

Program dan Kegiatan Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung berdasarkan Perubahan Renstra Kecamatan Cilengkrang Tahun 2021-2026 sebagai mana tabel T-C 33

TC 33

RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.00 KECAMATAN CILENGKRANG
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.00 KECAMATAN CILENGKRANG

Kode Rekening			Urusan, Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027				Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
									Target Capaian Kinerja			Target	
									Tolak Ukur		Target		
7	01	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP BMD dalam Keadaan Baik	80 point 86 %	5,567,716,233	APBD		Nilai SAKIP BMD dalam Keadaan Baik	81 point 88 %		5,447,500,000	
7	01	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	100%	42,548,800	APBD		Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	100%		67,000,000	
7	01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	12,863,600	APBD		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 dokumen		20,000,000	
7	01	1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3,648,000	APBD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		4,000,000	
7	01	1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4,702,500	APBD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		8,000,000	
7	01	1	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2,005,500	APBD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		4,000,000	
7	01	1	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	4,385,500	APBD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		8,000,000	
7	01	1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	4,060,500	APBD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen		8,000,000	
7	01	1	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	8,374,000	APBD		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen		8,000,000	
7	01	1	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	1,254,600	APBD		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen		3,500,000	

Kode Rekening				Urusan, Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027			
										Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
										Tolak Ukur	Target		
7	01	1	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Dokumen	1,254,600			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Dokumen	3,500,000
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	100%	4,999,313,548			Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	100%	4,614,100,000
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 orang/bulan	4,987,843,048	APBD		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 orang/bulan	4,596,100,000
7	01	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4 dokumen	4,330,000	APBD		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4 dokumen	6,000,000
7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dokumen	4,325,500	APBD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dokumen	6,000,000
7	01	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4 dokumen	2,815,000	APBD		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	6,000,000
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD sesuai ketentuan	100%	2,800,000	APBD		Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD sesuai ketentuan	100%	6,000,000
7	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 laporan	2,800,000	APBD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 laporan	6,000,000
7	01	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian PAD	100%	0	APBD		Persentase Capaian PAD	100%	0
7	01	01	2.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	laporan	0	APBD		Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	laporan	0
7	01	01	2.05	0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase dokumen pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tepat waktu	100%	32,296,000	APBD		persentase dokumen pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tepat waktu	100%	144,000,000
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	22,000,000	APBD		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	30,000,000

Kode Rekening				Urusan, Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027			
										Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
										Tolak Ukur	Target		
7	01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	24 dokumen	10,296,000	APBD		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	24 dokumen	24,000,000
7	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	0	APBD		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	90,000,000
7	01	01	2.06	0	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor	100%	111,110,650	APBD		Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor	100%	129,500,000
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 paket	5,999,200	APBD		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	6,000,000
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 paket	74,148,900	APBD		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	60,000,000
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 paket	5,474,980	APBD		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	12,000,000
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Logistik	12 paket	11,998,400	APBD		Jumlah Paket Penyediaan Bahan Logistik	12 paket	18,000,000
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	6,039,170	APBD		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	6,500,000
7	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	paket	0	APBD		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	paket	0
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 laporan	6,000,000	APBD		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 laporan	12,000,000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	1,450,000	APBD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	15,000,000
7	01	01	207	0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0%	0	APBD		Persentase dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87%	60,000,000
7	01	01	207	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit	0	APBD		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit	35,000,000
7	01	01	207	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	paket	-	APBD		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	25,000,000
7	01	01	207	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	-	APBD		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	-

Kode Rekening				Urusan, Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
										Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
										Tolak Ukur	Target	
7	01	01	207	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	APBD		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	0
7	01	01	207	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	APBD		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	0
7	01	01	208	0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	210,408,885	APBD		Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	168,400,000
7	01	01	208	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	26,331,285	APBD		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	23,400,000
7	01	01	208	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	184,077,600	APBD		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	145,000,000
7	01	01	209	0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Dalam Kondisi Baik	169,238,350	APBD		Persentase BMD Dalam Kondisi Baik	87%	258,500,000
7	01	01	209	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	69,388,000	APBD		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 unit mobil 4 motor	69,500,000
7	01	01	209	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9,460,000	APBD		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 unit/tahun	9,000,000
7	01	01	209	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	90,390,350	APBD		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	180,000,000
7	01	01	209	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang di pelihara	0	APBD		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang di pelihara	unit	0
					Jumlah 1		5,567,716,233					5,447,500,000
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	249,129,605	APBD		Indeks Kepuasan Masyarakat	86 poin	260,000,000

Kode Rekening				Urusan, Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
										Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
										Tolak Ukur	Target	
7	01	02	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100.00%	0	APBD		Persentase koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100.00%	0
7	01	02	2.01	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0 laporan	0	APBD		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0 laporan	0
7	01	02	2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan guna Mendukung Pelayanan Prima kepada Masyarakat di Kecamatan	100%	54,080,000	APBD		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan guna Mendukung Pelayanan Prima kepada Masyarakat di Kecamatan	100%	12,000,000
7	01	02	2.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	-	0	APBD		Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	-	0
7	01	02	2.02	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	54,080,000	APBD		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	12,000,000
7	01	02	2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	100%	33,473,000	APBD		Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	100%	48,000,000
7	01	02	2.03	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	2 dokumen	33,473,000	APBD		Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	4 dokumen	48,000,000
7	01	02	2.03	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta		0	APBD		Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta		0
7	01	02	2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan	100%	161,576,605	APBD		Persentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan	100%	200,000,000
7	01	02	2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	161,576,605	APBD		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3 Laporan	200,000,000

Kode Rekening			Urusan, Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
									Target Capaian Kinerja		Target Capaian Kinerja		
									Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur		Target
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Indeks Kepuasan Masyarakat	84 poin	74,337,000	APBD		Indeks Kepuasan Masyarakat		86 poin	167,000,000	
7	01	03	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	100%	19,912,000	APBD		Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa		100%	35,000,000	
7	01	03	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-	0	APBD		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		-	0	
7	01	03	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kecamatan	Jumlah laporan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kecamatan	laporan	0	APBD		Jumlah laporan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kecamatan		laporan	0	
7	01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	19,912,000	APBD		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		4 kegiatan	35,000,000	
7	01	03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi	100%	19,025,000	APBD		persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi		100%	60,000,000	
7	01	03	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2 lembaga	15,450,000	APBD		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya		4 lembaga	48,000,000	
7	01	03	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 laporan	3,575,000	APBD		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		2 Laporan	6,000,000	
7	01	03	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	laporan	0	APBD		Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		1 laporan	6,000,000	
7	01	03	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	100%	35,400,000	APBD		Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		100%	72,000,000	

Kode Rekening				Urusan, Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027				
										Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)		
										Tolak Ukur				
7	01	03	2.06	0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga	0	APBD		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	30 Keluarga	6,000,000	
7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	0	APBD		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	30 Keluarga	6,000,000
7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	30 Keluarga	3,900,000	APBD		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	30 Keluarga	6,000,000
7	01	03	2.06	0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Keluarga	0	APBD		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	30 Keluarga	6,000,000
7	01	03	2.06	0005	Peningkatan KKesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Keluarga	0	APBD		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	30 Keluarga	6,000,000
7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	30 Keluarga	7,140,000	APBD		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	30 Keluarga	6,000,000
7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	30 Keluarga	3,900,000	APBD		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	30 Keluarga	6,000,000
7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	30 Keluarga	3,900,000	APBD		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	30 Keluarga	6,000,000

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027													
Kode Rekening				Urusan, Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
										Tolak Ukur		Target	
7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarga	0	APBD		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	30 Keluarga	6,000,000
7	01	03	2.06	0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	30 Keluarga	3,900,000	APBD		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	30 Keluarga	6,000,000
7	01	03	2.06	0011	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Keluarga	0	APBD		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	30 Keluarga	6,000,000
7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti enumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Menuju Keluarga Berkualitas	30 Keluarga	12,660,000	APBD		Jumlah Keluarga yang Mengikuti penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Menuju Keluarga Berkualitas	30 Keluarga	6,000,000
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Indeks Kepuasan Masyarakat	84 poin	48,540,000	APBD		Indeks Kepuasan Masyarakat	86 poin	68,000,000
7	01	04	2.01	0	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	8,940,000	APBD		Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	20,000,000
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 laporan	8,940,000	APBD		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	20,000,000
7	01	04	2.02	0	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100%	39,600,000	APBD		Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100%	48,000,000
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 laporan	39,600,000	APBD		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 laporan	48,000,000
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Indeks Kepuasan Masyarakat	84 poin	116,788,600	APBD		Indeks Kepuasan Masyarakat	86 poin	136,000,000

Kode Rekening				Urusan, Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027			
										Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
										Tolak Ukur	Target		
7	01	05	2.01	0	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	116,788,600	APBD		Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	136,000,000
					Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	-	-	APBD		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	-	-
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	300 orang	39,820,000	APBD		Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Wawasan Kebangsaan dan	350 ORANG	50,000,000
7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	300 orang	37,019,600	APBD		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	350 ORANG	50,000,000
7	01	05	2.01	0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	1 dokumen	9,385,000	APBD		Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	1 dokumen	12,000,000
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 dokumen	30,564,000	APBD		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 dokumen	24,000,000
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Desa Berkategori Baik	1 Desa	51,323,900	APBD		Jumlah Desa Berkategori Baik	1 Desa	72,600,000
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang dibina	100%	51,323,900	APBD		Persentase desa yang dibina	100%	72,600,000

Kode Rekening				Urusan, Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
										Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
										Tolak Ukur	Target	
7	01	06	2.01	0002	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	6 dokumen	13,394,800	APBD		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	6 dokumen	18,300,000
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	6 dokumen	13,394,800	APBD		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	6 dokumen	18,300,000
7	01	06	2.01	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0 Dokumen	0	APBD		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0 Dokumen	0
7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	24,534,300	APBD		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	36,000,000
7	01	06	2.01	0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	0 Dokumen	0	APBD		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	0 Dokumen	0
7	01	06	2.01	0014	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	0 Dokumen	0	APBD		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	0 Dokumen	0
							540,119,105					703,600,000
							6,107,835,338					6,151,100,000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran, Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung menyusun suatu instrumen pelaksanaan teknis dalam bentuk program dan kegiatan. Sebagai salah satu instrumen, program akan mencakup satu atau beberapa kegiatan. Adapun kegiatan, sebagai turunan dari program, akan mencakup tindakan-tindakan pengeralihan sumber daya baik berupa sumber daya manusia maupun barang modal termasuk didalamnya peralatan dan teknologi sebagai input untuk menghasilkan output kegiatan yang telah ditargetkan.

Adapun pendanaan program, kegiatan, subkegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Cilengkrang Tahun Anggaran 2025 sepenuhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung. Dimana secara keseluruhan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan tahun 2025 ini masih sangat minim dibandingkan dengan Analisa kebutuhan yang diperlukan oleh Kecamatan Cilengkrang dalam pencapaian Target Kinerja yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renstra Kecamatan Cilengkrang Tahun 2021-2024.

Disamping itu Keputusan Bupati Bandung No. 137.1/Kep.580-Adpem/2018 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat belum berjalan secara optimal dikarenakan

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) di Kecamatan

- Banyak kecamatan belum memiliki aparatur yang cukup atau kompeten untuk melaksanakan kewenangan baru yang bersifat teknis dan administratif.
- Camat dan stafnya belum sepenuhnya memahami ruang lingkup dan tanggung jawab atas kewenangan yang dilimpahkan.

2. Koordinasi Lintas OPD yang Lemah

- Kurangnya sinergi antara camat dan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang sebelumnya memegang kewenangan tersebut menyebabkan tumpang tindih atau tarik menarik kewenangan.
- Ada kecenderungan SKPD enggan melepaskan kewenangannya secara penuh kepada camat.

3. Sarana dan Prasarana Penunjang Belum Memadai

- Kecamatan belum dilengkapi dengan infrastruktur, fasilitas, dan sistem informasi yang memadai untuk menjalankan layanan publik secara cepat dan berkualitas.
- Beberapa layanan seperti perizinan atau pengawasan membutuhkan dukungan teknologi dan sistem yang belum tersedia di tingkat kecamatan.

4. Ketiadaan SOP dan Juklak/Juknis Teknis Pelaksanaan

- Belum semua kewenangan yang dilimpahkan didukung dengan Standard Operating Procedure (SOP), petunjuk pelaksanaan, atau petunjuk teknis yang jelas dan seragam antar kecamatan.
- Hal ini menyebabkan kebingungan dalam pelaksanaan teknis, bahkan ada kewenangan yang tidak dijalankan sama sekali karena ketidakjelasan tersebut.

5. Rendahnya Pengawasan dan Evaluasi Berkala

- Pemerintah Kabupaten belum optimal melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi pelimpahan kewenangan ini.
- Tidak ada sanksi atau insentif yang mendorong camat untuk menjalankan kewenangan secara aktif.

6. Minimnya Anggaran dan Dukungan Keuangan

- Kewenangan yang dilimpahkan tidak diikuti dengan pelimpahan anggaran (budget follow function), menyebabkan camat tidak memiliki daya untuk mengeksekusi kegiatan secara maksimal.

7. Kultur Birokrasi yang Sentralistis

- Masih adanya pola pikir lama di mana camat hanya dianggap sebagai “perpanjangan tangan” bupati, bukan sebagai pelaksana kewenangan mandiri.
- Ini menyebabkan camat ragu untuk mengambil keputusan meski sudah mendapat mandat formal dari keputusan bupati.

Sehingga pada penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Cilengkrang Tahun 2025 akan diusulkan penambahan anggaran sesuai Analisa dan kebutuhan anggaran dalam pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan serta menutup kebutuhan belanja wajib mengikat dan belanja program prioritas bupati bandung serta kebutuhan belanja rutin operasional kecamatan dan belanja program, kegiatan, subkegiatan yang rutin dilaksanakan oleh kecamatan. Rincian Rencana kerja dan Pendanaan sebagai berikut :

Urusan, Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
KECAMATAN			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP BMD dalam Keadaan Baik	80 point 86 %	5,567,716,233
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	100%	42,548,800
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	12,863,600
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3,648,000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4,702,500
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2,005,500
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	4,385,500
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	4,060,500
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	8,374,000
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	1,254,600
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Dokumen	1,254,600
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	100%	4,999,313,548
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 orang/bulan	4,987,843,048
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4 dokumen	4,330,000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dokumen	4,325,500

Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4 dokumen	2,815,000
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD sesuai ketentuan	100%	2,800,000
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 laporan	2,800,000
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian PAD	100%	0
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	laporan	0
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase dokumen pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tepat waktu	100%	32,296,000
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	22,000,000
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	24 dokumen	10,296,000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	0
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor	100%	111,110,650
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 paket	5,999,200
Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 paket	74,148,900
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 paket	5,474,980
Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Logistik	12 paket	11,998,400
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	6,039,170
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	paket	0
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 laporan	6,000,000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	1,450,000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0%	0
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit	0

Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	paket	-
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	-
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	0
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	0
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	210,408,885
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	26,331,285
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	184,077,600
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Dalam Kondisi Baik	87%	169,238,350
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 unit mobil, 4 motor, 1 Torca	69,388,000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 unit/tahun	9,460,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	90,390,350
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang di pelihara	unit	0
Jumlah 1			5,567,716,233
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	84 poin	249,129,605
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100.00%	0
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0 laporan	0
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan guna Mendukung Pelayanan Prima kepada Masyarakat di Kecamatan	100%	54,080,000

Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	-	0
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	54,080,000
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	100%	33,473,000
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	2 dokumen	33,473,000
Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta		0
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan	100%	161,576,605
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	161,576,605
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Indeks Kepuasan Masyarakat	84 poin	74,337,000
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	100%	19,912,000
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-	0
Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kecamatan	Jumlah laporan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kecamatan	laporan	0
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	19,912,000
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi	100%	19,025,000
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2 lembaga	15,450,000
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 laporan	3,575,000

Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	laporan	0
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	100%	35,400,000
Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga	0
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	0
Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	30 Keluarga	3,900,000
Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Keluarga	0
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Keluarga	0
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	30 Keluarga	7,140,000
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	30 Keluarga	3,900,000
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	30 Keluarga	3,900,000
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarga	0
Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	30 Keluarga	3,900,000

Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Keluarga	0
Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti enumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	30 Keluarga	12,660,000
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Indeks Kepuasan Masyarakat	84 poin	48,540,000
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	8,940,000
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 laporan	8,940,000
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100%	39,600,000
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 laporan	39,600,000
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Indeks Kepuasan Masyarakat	84 poin	116,788,600
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	116,788,600
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	-	-
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	300 orang	39,820,000
Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal,	300 orang	37,019,600

	Regional, dan Nasional		
Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	1 dokumen	9,385,000
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 dokumen	30,564,000
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Desa Berkategori Baik	1 Desa	51,323,900
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang dibina	100%	51,323,900
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	6 dokumen	13,394,800
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	6 dokumen	13,394,800
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0 Dokumen	0
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	24,534,300
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	0 Dokumen	0
Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	0 Dokumen	0
			540,119,105
			6,107,835,338

BAB V

P E N U T U P

5.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Perubahan Renja

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cilengkrang Tahun 2025 berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025. Selain itu Renja juga sebagai landasan operasional perencanaan taktis tahunan bagi dinas/badan/lembaga yang isinya lebih memusatkan pada arah, tujuan, sasaran, program dan kegiatan jangka pendek.

Rencana Kerja sebagai dokumen perencanaan, memuat program dan kegiatan prioritas yang harus dijalankan dan diarahkan pada proses perencanaan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan dasar organisasi kecamatan melalui perencanaan pembangunan yang berkualitas dan professional dengan ditunjang sumber daya manusia yang berpikir sistematis/rasional, produktif, berdisiplin, bekerja efisien dan efektif untuk pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bandung.

5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program dan kegiatan pembangunan di dalam Rencana Kerja Kecamatan Cilengkrang Tahun 2025 bertujuan untuk meningkatkan Perencanaan Pembangunan yang berkualitas dan professional. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2025 tersebut, di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Sehubungan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan yang ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Renja Kecamatan Cilengkrang tahun 2025 , harus dilaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu melalui kerjasama dan koordinasi antar sekretariat dan seksi.
2. Dalam mempercepat perencanaan yang aspiratif upaya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan perlu terus ditingkatkan, mulai

dari tahapan perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan, sehingga diharapkan mereka mempunyai rasa memiliki dan bertanggungjawab terhadap hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.

3. Penyusunan Renja Kecamatan Cilengkrang Tahun 2025 masih belum sempurna, sesuai dengan yang diamanatkan di dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, karena pemahaman tentang aturan dan tata cara penyusunan Renja masih belum maksimal.
4. Penyusunan Renja Kecamatan Cilengkrang Tahun 2025 mengacu kepada Perubahan Renstra Kecamatan Tahun 2021-2026 yang disusun pada Januari 2024 sebagaimana amanat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.15.5.1317 tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah belum menyesuaikan jumlah anggaran yang dibutuhkan sedangkan program, kegiatan dan subkegiatan bertambah, sehingga mengganggu pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Hal ini terjadi karena belum dilaksanakannya perubahan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026.
5. Rancangan RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2025 sesuai dengan pagu indikatif hasil Desk yang dilaksanakan dengan Bappelitbangda Kabupaten Bandung pada bulan 22 Februari 2024 dimana dilaksanakan pergeseran anggaran dari program, kegiatan dan subkegiatan untuk menutup kebutuhan anggaran kegiatan belanja wajib mengikat dan anggaran kegiatan prioritas Bupati Bandung dari anggaran operasional rutin dan kegiatan rutin kecamatan.
6. Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Cilengkrang Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan tahunan SKPD dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi maupun yang bersumber dari APBN sesuai dengan analisa kebutuhan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dibutuhkan oleh Kecamatan Cilengkrang.
7. Rancangan Akhir Renja SKPD, di dalam proses penyusunannya harus memperhatikan / mempedomani dokumen - dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi,

RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RKPD Kabupaten Bandung dan Renstra Dinas).

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Transparansi dalam proses perencanaan pembangunan merupakan salah satu syarat dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang harus diikuti, diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Agar setiap keputusan/kebijakan publik dapat diterima dan dilaksanakan secara efektif, maka masyarakat harus dilibatkan sejak awal baik dalam proses perencanaan maupun perumusan kebijakannya, sehingga aspirasi dan kepentingannya terakomodasi di dalam kebijakan tersebut, dengan kata lain pembangunan berdasarkan partisipasi masyarakat atau pembangunan partisipatif. Transparansi sangat berkaitan dengan sistem informasi dan komunikasi serta merupakan prasarat demokratisasi dalam proses pengambilan keputusan publik.

Berdasarkan hal tersebut di atas, partisipasi masyarakat yang luas dalam perumusan kebijakan publik akan membutuhkan komitmen yang tinggi dalam implementasinya, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Terwujudnya perubahan paradigma pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan.
2. Terbangunnya kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, terwujudnya mekanisme kontrol dari anggota maupun kelompok masyarakat yang lebih terbuka dan bertanggung jawab tentang penyelenggaraan pemerintahan.
3. Terwujudnya partisipasi aktif masyarakat/swasta dalam kegiatan pembangunan.
4. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin kompleks, Upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bintek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana.
5. Menerapkan sistem *reward and punishment* terhadap seluruh karyawan dan mengaplikasikannya pada pendistribusian insentif berdasarkan beban kerja.
6. Memohon penyesuaian Perubahan Renstra Kecamatan Tahun 2021-2026 yang disusun pada Januari 2024 sebagaimana amanat Keputusan

Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.15.5.1317 tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah termasuk menyesuaikan jumlah anggaran yang dibutuhkan bertambah, sehingga pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dapat tercapai. Termasuk perubahan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026.

7. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif di dalam melaksanakan koordinasi dengan SKPD, agar proses pembangunan yang dilaksanakan agar berdaya guna dan berhasil guna.
8. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, sehingga transparansi akan lebih terwujud.
9. Dalam menetapkan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai dengan amanat peraturan perundangan yang berlaku, hal ini dapat dilaksanakan apabila kita mengacu jadwal yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan tahunan.

CAMAT CILENGKRANG

ttd

AGUS RIZAL

BUPATI BANDUNG

MOCHAMAD DADANG SUPRIATNA

LAMPIRAN